



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI **JAKARTA PUSAT**

TAHUN
2023
2026



RENCANA STRATEGIS
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

MAJU & INKLUSIF

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026 perlu adanya kolaborasi pemangku kepentingan serta dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di wilayah Jakarta Pusat.

Akhirnya, semoga Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi pedoman bagi para entitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan tugasnya.

Jakarta, 13 Juni 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
I.1. Latar Belakang	6
I.2. Landasan Hukum	9
I.3. Maksud dan Tujuan	10
I.3.1. Maksud	10
I.3.2. Tujuan.....	10
I.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI	 13
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat	16
II.1.1. Tugas.....	17
II.1.2. Fungsi.....	17
II.1.3. Struktur Organisasi Kota Administrasi	18
II.2. Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	23
II.2.1. Sumber Daya Manusia	23
II.2.2. Aset/Modal.....	29
II.3. Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	42
II.3.1. Capaian Indikator Kinerja	43
II.3.2. Realisasi Anggaran.....	46
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi .	49
II.4.1. Tantangan	49
II.4.2. Peluang	59

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	65
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
III.1.1. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi	65
III.1.2. Permasalahan Pelayanan di Bagian-Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	66
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	70
III.2.1. Visi	70
III.2.2. Misi	71
III.2.1. Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025	75
III.3. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	94
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	94
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis	94
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	96
IV.1. Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi	96
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	98
V.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi	98
V.2. Strategi	99
V.3. Arah Kebijakan	100
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	102
VI.1. Rencana Program dan Kegiatan	102
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	126
BAB VIII PENUTUP	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2023-2026	8
Gambar 2 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	13
Gambar 3 Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat 2019.....	16
Gambar 4 Struktur Organisasi Kota Administrasi	21
Gambar 5 Jumlah Kelurahan Terdampak dan Bebas banjir Per 1 Januari 2020	55
Gambar 6 Jumlah Pengungsi Banjir di Jakarta Per 1 Januari 2020	56
Gambar 7 Jumlah Sampah Masuk ke TPST Bantar Gebang Menurut Instansi Asal Kendaraan (Tonase/Tahun)	57
Gambar 8 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	61
Gambar 9 Rencana Siteplan Pasar Petojo Enclek.....	78
Gambar 10 Rencana Lantai 1 Pasar Petojo Enclek	79
Gambar 11 Rencana Lantai 2 Pasar Petojo Enclek	80
Gambar 12 Potongan Rencana Pasar Petojo Enclek	81
Gambar 13 Visualisasi Rencana Pasar Petojo Enclek.....	81
Gambar 14 Jalur intervensi untuk wisata pejalan kaki.....	82
Gambar 15 Titik destinasi wisata serta rute jalur wisata.....	83
Gambar 16 Masterplan Kantor Walikota Jakarta Pusat.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	14
Tabel 2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan	15
Tabel 3	Penyederhanaan Jabatan Pengawas Menjadi Jabatan Fungsional	22
Tabel 4	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	23
Tabel 5	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	24
Tabel 6	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 7	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	28
Tabel 8	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	28
Tabel 9	Jumlah Aset/Modal Bangunan di Kantor Walikota.....	30
Tabel 10	Jumlah Aset/Modal Lift di Kantor Walikota	31
Tabel 11	Jumlah Aset/Modal Rumah Dinas Walikota.....	31
Tabel 12	Jumlah Aset/Modal Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.....	32
Tabel 13	Jumlah Aset/Modal Menurut Rumah Dinas Camat dan Rumah Dinas Lurah .	36
Tabel 14	Jumlah Aset/Modal Peralatan dan Mesin di Kantor Walikota	41
Tabel 15	Jumlah Aset/Modal Aset Lainnya (Lahan).....	42
Tabel 16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Periode 2017-2022	43
Tabel 17	Realisasi Anggaran Kota Administrasi Periode 2017-2022	46
Tabel 18	Produk Domestik Regional Bruto	58
Tabel 19	Indikator Produk Domestik Regional Bruto.....	59
Tabel 20	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.	66
Tabel 21	Identifikasi Permasalahan Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	67
Tabel 22	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025	74
Tabel 23	Penentuan Isu Strategis	95
Tabel 24	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi.....	97
Tabel 25	Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal.....	98
Tabel 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	101
Tabel 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Peringkat Daerah	109

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional. Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan baik skala nasional maupun skala daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) digunakan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode empat tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Proses penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat dilaksanakan dengan beberapa tahap yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat sampai

I.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026, sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 14) Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam periode 2023-2026;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi para pemangku kepentingan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan fungsinya

I.3.2. Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.

I.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat.

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

II.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Pusat

II.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis pada bab II.4 dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat; telaahan visi, misi, dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025; Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta penentuan isu-isu strategis.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan untuk menangani isu strategis dan menjawab tujuan dan sasaran RPD sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada lima tahun yang akan datang idealnya berada pada level outcome.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI

Secara astronomis Kota terletak antara $106^{\circ} 22'42''$ BT sampai dengan $106^{\circ} 58'18''$ BT dan $5^{\circ} 19'12''$ LS sampai dengan $6^{\circ} 23'54''$ LS. Luas Wilayah Kota Administrasi sebesar 48,13 Km², dengan kondisi permukaan tanah relatif datar, terletak sekitar 4 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Administrasi disebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Utara dan Barat, sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur, sebelah Pusat berbatasan dengan dan Timur serta disebelah barat berbatasan dengan Jakarta Barat.

Gambar 2 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat



Sumber : Jakarta Pusat Dalam Angka (Diolah)

Kota Administrasi terdiri dari 8 kecamatan dan 44 kelurahan, lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Kecamatan	No	Kelurahan
1	Kecamatan Tanah Abang	1	Gelora
		2	Bendungan Hilir
		3	Karet Tengsin
		4	Kebon Melati
		5	Petamburan
		6	Kebon Kacang
		7	Kampung Bali
2	Kecamatan Menteng	1	Menteng
		2	Pegangsaan
		3	Cikini
		4	Gondangdia
		5	Kebon Sirih
3	Kecamatan Senen	1	Kenari
		2	Paseban
		3	Kramat
		4	Kwitang
		5	Senen
		6	Bungur
4	Kecamatan Johar Baru	1	Johar Baru
		2	Kampung Rawa
		3	Tanah Tinggi
		4	Galur
5	Kecamatan Cempaka Putih	1	Rawasari
		2	Cempaka Putih Timur
		3	Cempaka Putih Barat
6	Kecamatan Kemayoran	1	Harapan Mulya
		2	Cempaka Baru
		3	Sumur Batu
		4	Serdang
		5	Utan Panjang
		6	Kebon Kosong
		7	Kemayoran
		8	Gunung Sahari Selatan
7	Kecamatan Sawah Besar	1	Pasar Baru
		2	Gunung Sahari Utara
		3	Kartini
		4	Karang Anyar
		5	Mangga Dua Selatan
8	Kecamatan Gambir	1	Cideng
		2	Petojo Selatan
		3	Gambir
		4	Petojo Utara
		5	Kebon Kelapa
		6	Duri Pulo

Sumber : Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan data penduduk konsolidasi DDN Desember 2019 (Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat), jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 1.148.447 jiwa, yang terdiri dari 578.430 berjenis kelamin laki-laki dan 570.017 penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk dengan status Warga Negara Asing (WNA) tercatat sebanyak 729 jiwa, 171 berjenis kelamin laki-laki dan 89 berjenis kelamin perempuan.

Tingkat kepadatan penduduk per Juni 2020 sebesar 23.927,57 jiwa/km², mengalami kenaikan dibandingkan tingkat kepadatan penduduk menurut data Tahun 2018 yaitu 23.820 jiwa/km². Berdasarkan kecamatan, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Johar Baru, 61.405,97 jiwa/km² dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Gambir, 13.273,51 jiwa/km².

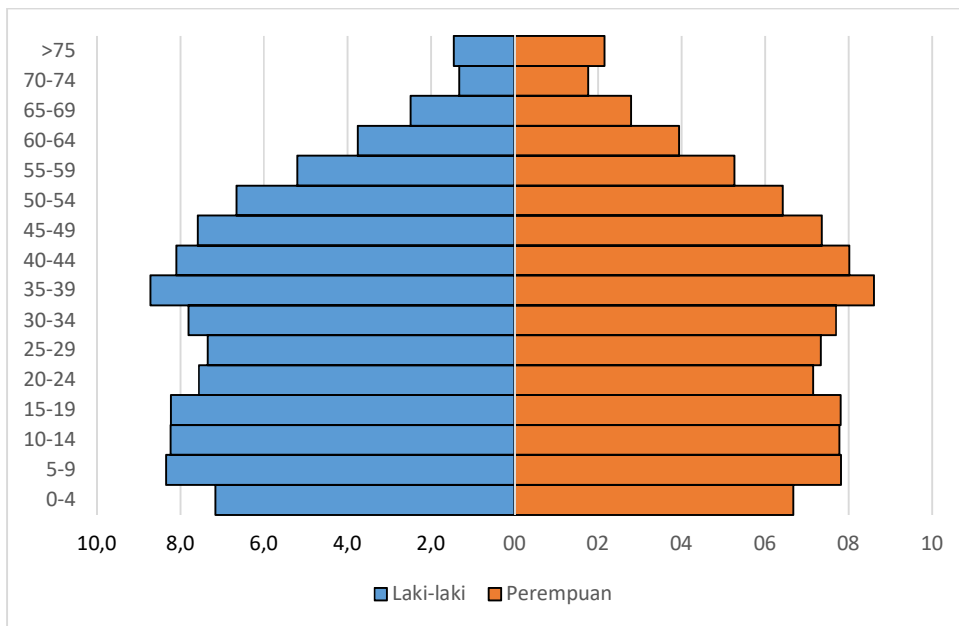
Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2020			% Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Kepadatan Jiwa/Km ²
		L	P	Total			
1	Gambir	50.751	49.983	100.734	8,74	7,59	13.273,51
2	Sawah Besar	66.945	66.816	133.761	11,61	6,16	21.725,38
3	Kemayoran	133.351	131.693	265.044	23,01	7,25	36.539,65
4	Senen	65.526	63.983	129.509	11,24	4,22	30.687,88
5	Cempaka Putih	50.801	51.118	101.919	8,85	4,69	21.720,94
6	Menteng	46.436	45.776	92.212	8,08	6,53	14.110,91
7	Tanah Abang	92.380	90.168	182.548	15,85	9,31	19.610,89
8	Johar Baru	73.935	72.027	145.962	12,67	2,38	61.405,97
Total				1.151.689	100	48,13	23.928,71

Sumber : Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat

Selanjutnya penduduk di Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat ditinjau berdasarkan struktur umurnya, berdasarkan piramida penduduk pada Gambar 2, dapat diketahui komposisi penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat per Desember Tahun 2019.

Gambar 3 Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat 2019



Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) sebesar 8 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15–64 tahun) berjumlah 70,79 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 6,03 persen.

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai unsur pembantu Gubernur, Kota Administrasi mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

II.1.1. Tugas

Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

II.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kota Administrasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi;

- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi;
- q. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

II.1.3. Struktur Organisasi Kota Administrasi

Struktur Organisasi Kota Administrasi terdiri dari :

- a) Walikota;
- b) Wakil Walikota;
- c) Sekretariat Kota, terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pelayanan Hukum;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM.
 - c) Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Tatalaksana; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kepariwisata dan Ketenagakerjaan;
 - 2) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan; dan
 - 3) Subbagian Perhubungan serta Perindustrian dan Energi.

- b) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sarana dan Prasarana Kota;
 - 2) Subbagian Tata Ruang dan Pertanahan; dan
 - 3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

- 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.

 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perbendaharaan.

 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Sosial, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Subbagian Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip;
 - 3) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

 - d) Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Camat;
 - 2. Wakil Camat;
 - 3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

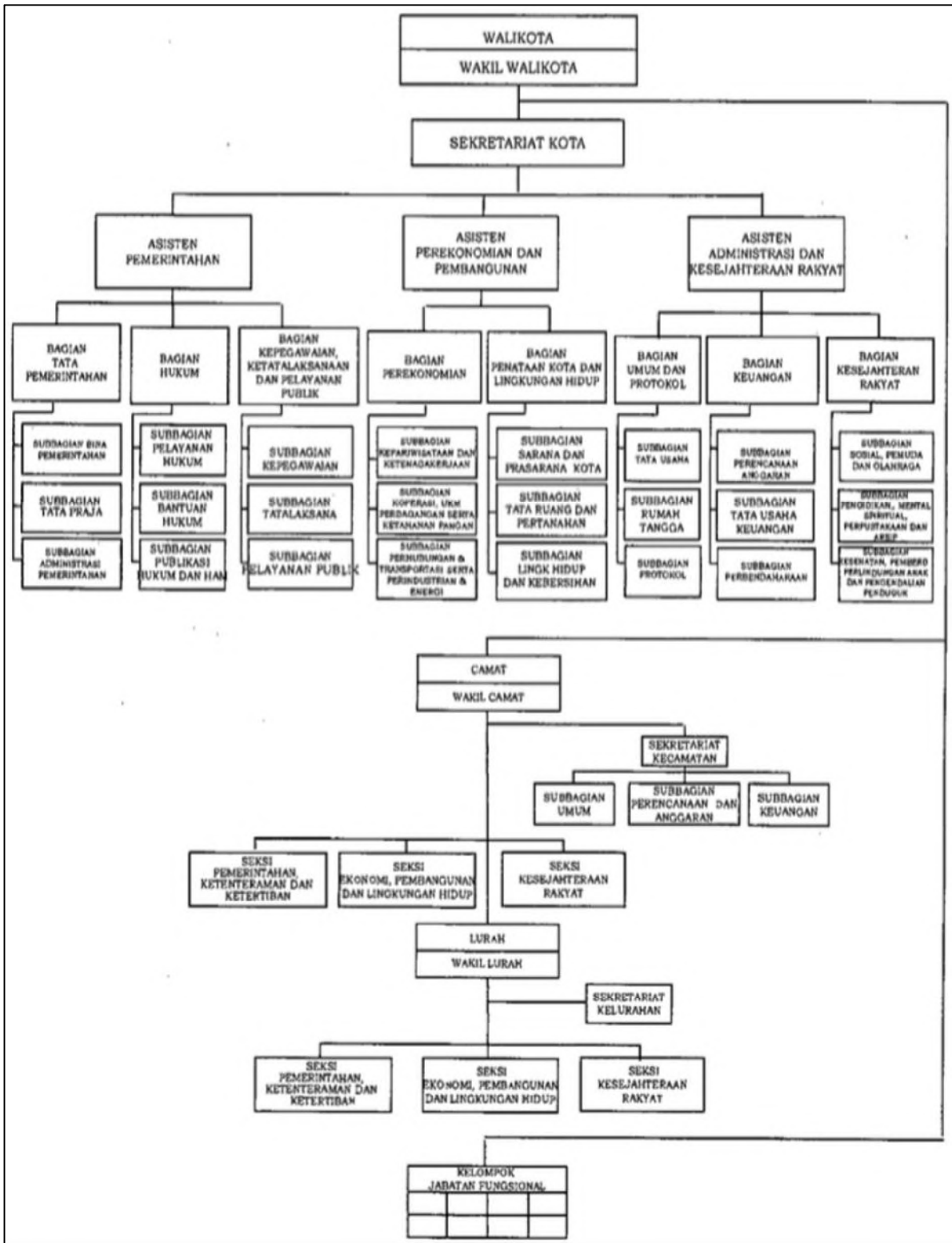
7. Kelurahan, terdiri dari :

- a) Lurah;
- b) Wakil Lurah;
- c) Sekretariat Kelurahan;
- d) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar 2.3 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

Gambar 4 Struktur Organisasi Kota Administrasi



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026 terjadi penyederhanaan birokrasi dalam bentuk penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami penyederhanaan Jabatan Administrasi pada level jabatan pengawas sebanyak 18 jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional seperti pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Penyederhanaan Jabatan Pengawas Menjadi Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan Sebelum Penyederhanaan	Nama Jabatan Setelah Penyederhanaan
1	Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Bina Pemerintahan
2	Kepala Sub Bagian Tata Praja	Analisis Kebijakan Kepala Subbagian Tata Praja
3	Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum	Analisis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum
4	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Analisis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum
5	Kepala Sub Bagian Publikasi Hukum Dan Ham	Analisis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum
6	Kepala Subbagian Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Kepegawaian
7	Kepala Subbagian Tatalaksana	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Tata Laksana
8	Kepala Subbagian Pelayanan Publik	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Publik
9	Kepala Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pariwisata, Pangan, Kelautan Dan Pertanian
10	Kepala Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
11	Kepala Subbagian Perhubungan Dan Tenaga Kerja	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Perhubungan Dan Tenaga Kerja
12	Kepala Subbagian Pekerjaan Umum	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pekerjaan Umum
13	Kepala Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan
14	Kepala Subbagian Lingkungan Hidup Dan Ruang Terbuka Hijau	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Lingkungan Hidup Dan Ruang Terbuka Hijau
15	Kepala Subbagian Program Dan Anggaran	Perencana Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Program Dan Anggaran
16	Kepala Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan Dan Kearsipan	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Sosial, Olahraga, Perpustakaan Dan Kearsipan
17	Kepala Subbagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Mental Spiritual	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pendidikan, Kebudayaan Dan Mental Spiritual
18	Kepala Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Kesehatan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

II.2. Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sampai dengan bulan Februari 2022, jumlah pegawai Kota Administrasi dan jajarannya sebanyak 422 orang pegawai yang tersebar di Sekretariat Kota, 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan dengan profil demografi sebagai berikut:

II.2.1. Sumber Daya Manusia

II.2.1.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Jumlah pegawai menurut kelompok umur di Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat di lihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	UKPD	Kelompok Umur						Jumlah
		<20	21-30	31-40	41-50	51-55	> 56	
1	Sekretariat Kota	0	3	36	35	19	13	106
2	Kecamatan Cempaka Putih	0	1	2	7	2	0	12
3	Kecamatan Gambir	0	0	2	4	3	2	11
4	Kecamatan Johar Baru	0	0	4	2	4	1	11
5	Kecamatan Kemayoran	0	0	3	4	2	1	10
6	Kecamatan Menteng	0	0	4	3	2	0	9
7	Kecamatan Sawah Besar	0	0	3	3	4	2	12
8	Kecamatan Senen	0	0	2	3	5	2	12
9	Kecamatan Tanah Abang	0	1	4	1	4	4	14
10	Kelurahan Bendungan Hilir	0	0	2	1	2	2	7
11	Kelurahan Bungur	0	0	4	2	1	2	9
12	Kelurahan Cempaka Baru	0	0	3	1	1	2	7
13	Kelurahan Cempaka Putih Barat	0	0	2	3	1	2	8
14	Kelurahan Cempaka Putih Timur	0	0	3	3	1	0	7
15	Kelurahan Cideng	0	0	4	0	1	2	7
16	Kelurahan Cikini	0	0	5	1	1	0	7
17	Kelurahan Duri Pulo	0	1	2	0	2	2	7
18	Kelurahan Galur	0	0	2	3	2	1	8
19	Kelurahan Gambir	0	0	3	1	1	2	7
20	Kelurahan Gelora	0	1	1	2	4	1	9
21	Kelurahan Gondangdia	0	0	4	0	1	2	7
22	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	0	1	0	3	2	2	8
23	Kelurahan Gunung Sahari Utara	0	1	2	0	3	1	7
24	Kelurahan Harapan Mulia	0	0	4	1	1	0	6
25	Kelurahan Johar Baru	0	0	1	3	3	0	7
26	Kelurahan Kampung Bali	0	1	4	0	2	0	7
27	Kelurahan Kampung Rawa	0	0	4	2	1	0	7
28	Kelurahan Karang Anyar	0	1	2	0	2	1	6
29	Kelurahan Karet Tengsin	0	1	3	3	2	0	9
30	Kelurahan Kartini	0	0	4	3	0	0	7
31	Kelurahan Kebon Kacang	0	1	3	1	0	3	8
32	Kelurahan Kebon Kelapa	0	0	4	3	0	0	7
33	Kelurahan Kebon Kosong	0	0	4	0	2	0	6
34	Kelurahan Kebon Melati	0	1	2	0	4	3	10
35	Kelurahan Kebon Sirih	0	1	5	0	0	1	7
36	Kelurahan Kemayoran	0	0	3	2	2	1	8

No	UKPD	Kelompok Umur					Jumlah	
		<20	21-30	31-40	41-50	51-55		> 56
37	Kelurahan Kenari	0	0	4	1	2	1	8
38	Kelurahan Kramat	0	0	1	3	1	2	7
39	Kelurahan Kwitang	0	1	2	1	1	1	6
40	Kelurahan Mangga Dua Selatan	0	0	3	1	2	1	7
41	Kelurahan Menteng	0	0	1	5	1	1	8
42	Kelurahan Pasar Baru	0	0	3	0	2	2	7
43	Kelurahan Paseban	0	0	3	2	2	2	9
44	Kelurahan Pegangsaan	0	1	3	2	1	2	9
45	Kelurahan Petamburan	0	0	1	3	2	1	7
46	Kelurahan Petojo Selatan	0	0	6	1	1	0	8
47	Kelurahan Petojo Utara	0	0	1	2	4	1	8
48	Kelurahan Rawasari	0	0	3	2	3	0	8
49	Kelurahan Senen	0	2	2	2	1	1	8
50	Kelurahan Serdang	0	0	4	0	3	1	8
51	Kelurahan Sumur Batu	0	0	2	2	3	0	7
52	Kelurahan Tanah Tinggi	0	0	2	2	2	2	8
53	Kelurahan Utan Panjang	0	0	5	1	2	0	8
TOTAL		0	19	186	130	120	73	528

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Tabel 4 jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat paling banyak berada di kelompok umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 186 orang (35,23%). Sedangkan kelompok umur 51-55 tahun sebanyak 120 orang (22,73%). Untuk kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 130 orang (24,62%), kelompok umur >56 tahun sebanyak 73 orang (13,83%), dan kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 19 orang (3,59%). Adapun kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur <20 tahun sebanyak 0 orang (0%). Kondisi demikian bermakna dalam 2 (dua) tahun mendatang terdapat 13,83% pegawai yang akan memasuki masa pensiun, sehingga perlu diantisipasi dalam pengelolaan kepegawaian di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

II.2.1.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berikut ini pesebaran pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat menurut golongan seperti tergambar pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	UKPD	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Kota	1	21	60	24	106
2	Kecamatan Cempaka Putih	0	2	5	5	12
3	Kecamatan Gambir	0	1	4	6	11
4	Kecamatan Johar Baru	0	0	8	3	11
5	Kecamatan Kemayoran	0	2	5	3	10

No.	UKPD	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
6	Kecamatan Menteng	0	1	6	2	9
7	Kecamatan Sawah Besar	0	0	10	2	12
8	Kecamatan Senen	0	0	7	5	12
9	Kecamatan Tanah Abang	1	3	6	4	14
10	Kelurahan Bendungan Hilir	0	1	6	0	7
11	Kelurahan Bungur	1	1	6	1	9
12	Kelurahan Cempaka Baru	0	1	6	0	7
13	Kelurahan Cempaka Putih Barat	0	1	7	0	8
14	Kelurahan Cempaka Putih Timur	0	1	6	0	7
15	Kelurahan Cideng	0	1	6	0	7
16	Kelurahan Cikini	0	1	6	0	7
17	Kelurahan Duri Pulo	0	1	6	0	7
18	Kelurahan Galur	0	2	6	0	8
19	Kelurahan Gambir	0	1	5	1	7
20	Kelurahan Gelora	0	1	8	0	9
21	Kelurahan Gondangdia	0	0	7	0	7
22	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	0	2	6	0	8
23	Kelurahan Gunung Sahari Utara	0	1	6	0	7
24	Kelurahan Harapan Mulia	0	1	5	0	6
25	Kelurahan Johar Baru	0	2	4	1	7
26	Kelurahan Kampung Bali	0	2	5	0	7
27	Kelurahan Kampung Rawa	0	2	5	0	7
28	Kelurahan Karang Anyar	0	0	6	0	6
29	Kelurahan Karet Tengsin	1	2	6	0	9
30	Kelurahan Kartini	0	1	6	0	7
31	Kelurahan Kebon Kacang	0	0	8	0	8
32	Kelurahan Kebon Kelapa	0	0	7	0	7
33	Kelurahan Kebon Kosong	0	1	5	0	6
34	Kelurahan Kebon Melati	1	2	6	1	10
35	Kelurahan Kebon Sirih	0	2	5	0	7
36	Kelurahan Kemayoran	1	0	7	0	8
37	Kelurahan Kenari	0	0	7	1	8
38	Kelurahan Kramat	0	1	5	1	7
39	Kelurahan Kwitang	0	2	4	0	6
40	Kelurahan Mangga Dua Selatan	0	2	5	0	7
41	Kelurahan Menteng	0	3	5	0	8
42	Kelurahan Pasar Baru	0	1	6	0	7
43	Kelurahan Paseban	1	2	5	1	9
44	Kelurahan Pegangsaan	0	2	6	1	9
45	Kelurahan Petamburan	0	1	6	0	7
46	Kelurahan Petojo Selatan	0	2	6	0	8
47	Kelurahan Petojo Utara	1	0	7	0	8
48	Kelurahan Rawasari	0	2	6	0	8
49	Kelurahan Senen	0	1	7	0	8
50	Kelurahan Serdang	0	1	7	0	8
51	Kelurahan Sumur Batu	0	3	4	0	7
52	Kelurahan Tanah Tinggi	0	1	7	0	8
53	Kelurahan Utan Panjang	0	1	7	0	8
TOTAL		19	85	373	62	528

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Tabel 5 di atas diketahui bahwa pegawai yang terbanyak menempati golongan III sebanyak 373 orang (70,64%), selebihnya yang menempati golongan IV sebanyak 62 orang (11,74%), kemudian golongan II sebanyak 85 orang (16,09%) serta pegawai yang menempati golongan I sebanyak 19 orang (3,6%). Data tersebut menunjukkan 70 persen lebih pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Sehingga Subbagian Kepegawaian Kota Administrasi perlu melakukan pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dikembangkan secara optimal.

II.2.1.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Selanjutnya pesebaran pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat Menurut Tingkat Pendidikan seperti tergambar pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	UKPD	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretariat Kota	0	0	25	6	1	41	31	2	106
2	Kecamatan Cempaka Putih	0	0	0	3	0	4	5	0	12
3	Kecamatan Gambir	0	0	1	0	0	5	5	0	11
4	Kecamatan Johar Baru	0	0	0	2	0	6	3	0	11
5	Kecamatan Kemayoran	0	0	0	2	1	5	2	0	10
6	Kecamatan Menteng	0	0	1	1	0	4	3	0	9
7	Kecamatan Sawah Besar	0	0	0	1	0	8	3	0	12
8	Kecamatan Senen	0	0	0	1	0	6	5	0	12
9	Kecamatan Tanah Abang	0	1	2	2	0	3	6	0	14
10	Kelurahan Bendungan Hilir	0	0	1	2	0	3	1	0	7
11	Kelurahan Bungur	0	1	1	1	0	5	1	0	9
12	Kelurahan Cempaka Baru	0	0	1	1	0	5	0	0	7
13	Kelurahan Cempaka Putih Barat	0	0	2	1	0	5	0	0	8
14	Kelurahan Cempaka Putih Timur	0	0	1	0	0	5	1	0	7
15	Kelurahan Cideng	0	0	0	2	0	4	1	0	7
16	Kelurahan Cikini	0	0	0	2	1	4	0	0	7
17	Kelurahan Duri Pulo	0	0	1	1	0	4	1	0	7
18	Kelurahan Galur	0	0	1	1	0	6	0	0	8
19	Kelurahan Gambir	0	0	0	1	0	5	1	0	7
20	Kelurahan Gelora	0	0	2	1	0	6	0	0	9
21	Kelurahan Gondangdia	0	0	0	1	0	5	1	0	7
22	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	0	0	2	0	0	5	1	0	8
23	Kelurahan Gunung Sahari Utara	0	0	1	0	0	5	1	0	7
24	Kelurahan Harapan Mulia	0	0	1	0	0	5	0	0	6
25	Kelurahan Johar Baru	0	0	0	2	0	3	2	0	7
26	Kelurahan Kampung Bali	0	0	1	1	0	5	0	0	7
27	Kelurahan Kampung Rawa	0	0	1	1	0	4	1	0	7
28	Kelurahan Karang Anyar	0	0	1	1	1	3	0	0	6
29	Kelurahan Karet Tengsin	0	1	3	0	0	3	2	0	9
30	Kelurahan Kartini	0	0	1	1	0	4	1	0	7

No.	UKPD	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3	
31	Kelurahan Kebon Kacang	0	0	2	1	0	5	0	0	8
32	Kelurahan Kebon Kelapa	0	0	0	1	0	6	0	0	7
33	Kelurahan Kebon Kosong	0	0	1	1	0	4	0	0	6
34	Kelurahan Kebon Melati	0	1	2	2	0	4	1	0	10
35	Kelurahan Kebon Sirih	0	0	1	2	0	4	0	0	7
36	Kelurahan Kemayoran	0	1	0	2	0	5	0	0	8
37	Kelurahan Kenari	0	1	1	0	0	5	1	0	8
38	Kelurahan Kramat	0	0	2	0	0	5	0	0	7
39	Kelurahan Kwitang	0	0	1	1	0	3	1	0	6
40	Kelurahan Mangga Dua Selatan	0	0	0	2	0	5	0	0	7
41	Kelurahan Menteng	0	0	4	0	0	3	1	0	8
42	Kelurahan Pasar Baru	0	0	1	0	0	6	0	0	7
43	Kelurahan Paseban	1	0	1	1	0	5	1	0	9
44	Kelurahan Pegangsaan	0	0	1	1	0	6	1	0	9
45	Kelurahan Petamburan	0	0	1	1	0	5	0	0	7
46	Kelurahan Petojo Selatan	0	0	2	0	0	6	0	0	8
47	Kelurahan Petojo Utara	1	0	2	1	0	4	0	0	8
48	Kelurahan Rawasari	0	0	1	1	0	5	1	0	8
49	Kelurahan Senen	0	0	3	0	1	3	1	0	8
50	Kelurahan Sudang	0	0	1	0	0	6	1	0	8
51	Kelurahan Sumur Batu	0	0	2	1	0	4	0	0	7
52	Kelurahan Tanah Tinggi	0	0	2	0	0	6	0	0	8
53	Kelurahan Utan Panjang	0	0	2	1	0	5	0	0	8
TOTAL		2	6	83	57	5	286	87	2	528

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Tabel 6 sebagian besar pegawai Kota Administrasi adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 286 orang (54,16%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 87 orang (16,47%), S3 sebanyak 2 orang (0,37%), D4 sebanyak 5 orang (0,94%), D3 sebanyak 57 orang (10,79%), SMA sebanyak 83 orang (15,71%) SMP sebanyak 6 orang (1,13%) dan SD sebanyak 2 orang (0,37%). Dapat disimpulkan bahwa secara umum pegawai Kota Administrasi sudah baik karena 54,16% pegawainya memiliki tingkat pendidikan akademik S1 ke atas.

II.2.1.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kota Administrasi, saat ini dari 329 jabatan struktural yang tersedia mulai dari Sekretariat Kota, Kecamatan hingga Kelurahan sebagaimana penjelasan dalam Tabel 6 yang dijabarkan berdasarkan eselon baru terisi sebanyak 317 orang (96,35%) sedangkan sisanya 12 orang (3,65%) belum terisi. Dengan rincian, untuk eselon II.a sebanyak 1 orang (0,19%), eselon II.b sebanyak 2

orang (0,38%) , eselon III.a sebanyak 11 orang (2,08%), eselon III.b sebanyak 23 orang (4,35%), eselon IV.a sebanyak 89 orang (16,86%), dan eselon IV.b sebanyak 191 orang (36,17%) sedangkan untuk jabatan non eselon sebanyak 211 orang (39,96%)

Tabel 7 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.a	1
2	Eselon II.b	2
3	Eselon III.a	11
4	Eselon III.b	23
5	Eselon IV.a	89
6	Eselon IV.b	191
7	Non Eselon	211
TOTAL		528

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

II.2.1.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kota Administrasi didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebesar 55,8% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebesar 44%. Kondisi demikian menggambarkan bahwa Kota Administrasi berkontribusi signifikan terhadap besaran Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi DKI Jakarta untuk variabel keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional. Secara numerik dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat Kota	60	46	106
2	Kecamatan Cempaka Putih	7	5	12
3	Kecamatan Gambir	7	4	11
4	Kecamatan Johar Baru	5	6	11
5	Kecamatan Kemayoran	9	1	10
6	Kecamatan Menteng	7	2	9
7	Kecamatan Sawah Besar	5	7	12
8	Kecamatan Senen	7	5	12
9	Kecamatan Tanah Abang	8	6	14
10	Kelurahan Bendungan Hilir	3	4	7
11	Kelurahan Bungur	5	4	9
12	Kelurahan Cempaka Baru	3	4	7
13	Kelurahan Cempaka Putih Barat	3	5	8
14	Kelurahan Cempaka Putih Timur	4	3	7
15	Kelurahan Cideng	3	4	7

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
16	Kelurahan Cikini	3	4	7
17	Kelurahan Duri Pulo	4	3	7
18	Kelurahan Galur	4	4	8
19	Kelurahan Gambir	5	2	7
20	Kelurahan Gelora	5	4	9
21	Kelurahan Gondangdia	4	3	7
22	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	5	3	8
23	Kelurahan Gunung Sahari Utara	3	4	7
24	Kelurahan Harapan Mulia	3	3	6
25	Kelurahan Johar Baru	5	2	7
26	Kelurahan Kampung Bali	3	4	7
27	Kelurahan Kampung Rawa	4	3	7
28	Kelurahan Karang Anyar	2	4	6
29	Kelurahan Karet Tengsin	7	2	9
30	Kelurahan Kartini	6	1	7
31	Kelurahan Kebon Kacang	7	1	8
32	Kelurahan Kebon Kelapa	3	4	7
33	Kelurahan Kebon Kosong	2	4	6
34	Kelurahan Kebon Melati	6	4	10
35	Kelurahan Kebon Sirih	4	3	7
36	Kelurahan Kemayoran	5	3	8
37	Kelurahan Kenari	3	5	8
38	Kelurahan Kramat	2	5	7
39	Kelurahan Kwitang	1	5	6
40	Kelurahan Mangga Dua Selatan	5	2	7
41	Kelurahan Menteng	6	2	8
42	Kelurahan Pasar Baru	3	4	7
43	Kelurahan Paseban	3	6	9
44	Kelurahan Pegangsaan	6	3	9
45	Kelurahan Petamburan	3	4	7
46	Kelurahan Petojo Selatan	4	4	8
47	Kelurahan Petojo Utara	4	4	8
48	Kelurahan Rawasari	3	5	8
49	Kelurahan Senen	5	3	8
50	Kelurahan Serdang	4	4	8
51	Kelurahan Sumur Batu	4	3	7
52	Kelurahan Tanah Tinggi	4	4	8
53	Kelurahan Utan Panjang	2	6	8
TOTAL		288	240	528

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

II.2.2. Aset/Modal

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kota Administrasi, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Administrasi. Berdasarkan Tabel 9 di bawah ini, dijabarkan jumlah aset/modal bangunan di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tabel 9 Jumlah Aset/Modal Bangunan di Kantor Walikota

NO	BLOK	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN RENOVASI TERAKHIR	KONDISI FISIK			JUMLAH LIFT	KETERANGAN
						RB	RS	RR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BLOK A	9600	8	31/12/1982	2021	-	-	√	3	-
2	BLOK B	4489	5	31/12/1989	2019	-	√	-	2	-
3	BLOK C	10747	5	31/12/1992	2019	-	√	-	2	-
4	MASJID	2174	2	31/12/2011	2021	-	√	-	0	-
5	LAPANGAN TENIS	500	-	31/12/2012	-	-	√	-	0	-
6	BLOK D	1728	8	31/12/2015	-	-	-	√	3	-
7	BANK SAMPAH	144	-	31/12/2016	-	-	√	-	0	-

Keterangan : RB= Rusak Berat, RS = Rusak Sedang, RR = Rusak Ringan

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat

Pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa bangunan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat jika dilihat dari kondisi fisiknya terdapat 5 lokasi yang kondisinya rusak sedang yaitu Blok B, Blok C, Masjid, Lapangan Tenis, dan Bank Sampah. Sedangkan yang kondisi fisiknya rusak ringan yaitu Blok A dan Blok D.

Selanjutnya pada Tabel 10 di bawah ini, dijabarkan jumlah aset/modal Lift di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tabel 10 Jumlah Aset/Modal Lift di Kantor Walikota

NO	BLOK	TAHUN PENGADAAN	JENIS PEMELIHARAAN	JUMLAH LIFT	KAPASITAS ANGKUT	KONDISI FISIK			JUMLAH LANTAI	KETERANGAN
						RB	RS	RR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BLOK A	-	REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN RUTIN	3	13	-	-	√	8	-
2	BLOK B	-	REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN RUTIN	2	10	-	√	-	5	-
3	BLOK C	-	REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN RUTIN	2	10	-	-	√	5	-
4	BLOK D	2015	REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN RUTIN	3	20	-	-	√	8	-

Keterangan : RB= Rusak Berat, RS = Rusak Sedang, RR = Rusak Ringan

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat

Pada tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa aset/modal berupa lift di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat jika dilihat dari kondisinya terdapat 1 (satu) lokasi yang kondisinya rusak sedang yaitu Blok B, sedangkan yang kondisinya rusak ringan terdapat 3 (tiga) lokasi yaitu Blok A, Blok C dan Blok D. Kota Administrasi Jakarta Pusat juga memiliki aset/modal berupa Rumah Dinas Walikota Jakarta Pusat seperti pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11 Jumlah Aset/Modal Rumah Dinas Walikota

NO.	A L A M A T	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN RENOVASI TERAKHIR	KONDISI FISIK			KETERANGAN
						RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Jl. Taman Sunda Kelapa No.6	350	2	1975	2015	-	-	√	

Keterangan : RB= Rusak Berat, RS = Rusak Sedang, RR = Rusak Ringan

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat

Tabel 12 Jumlah Aset/Modal Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFIK AT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNA N	JUMLA H LANTA I	TAHUN TERAKH IR DIREHA B	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUN AN (M ²)				R B	R R	R S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	KECAMATAN GAMBIR	Jl. Tanah Abang 1 No. 10	Nomor 69 Tanggal 28 Maret 1981	1102	2698	2013	5	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Gambir	Jl. Budi Kemuliaan No. 12	-	1067	266,86	2017	7	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Cideng	Jl. Petojo Selatan XI No. 19 RT.007 RW.011	105 Tanggal 08-03-1981	1180	790	1981	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
3	Kelurahan Petojo Utara	Jl. Pembangunan 2 Taman	85 Tanggal 28 Maret 1981	781	684	2011	4	-		√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
4	Kelurahan Petojo Selatan	Jl. Petojo Melintang No. 19	P.80/1984/ 1907M2	1131	1000	2017	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
5	Kelurahan Kebon Kelapa	Jl. Batu tulis VII No. 21 RT.006 RW.03	-	1000	1500	2015	3	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
6	Kelurahan Duri Pulo	Jl. Petojo Barat V	P.79/81	743	648	2010	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
II.	KEC. SAWAH BESAR	Jl. Karang Anyar No. 12		3011	2140	2004	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Pasar Baru	Jl. Krekot Jaya I No. 4C	-	1200	790	2015	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Karang Anyar	Jl. B Raya I RT.007 RW.05	396	1000	583	1992	3	-		√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
3	Kelurahan Kartini	Jl. Kartini VIII Dalam No. 18	-	981	583	1992	3	2016 (Rehab Berat)		√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
4	Kelurahan Gunung Sahari Utara	Jl. Gunung Sahari Villa/30, Jakarta Pusat	-	1200	583	1995	3	-		√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
5	Kelurahan Mangga Dua Selatan	Jl. Mangga Dua Dalam I	485	732	790	1990	3	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFIKAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				R B	R R	R S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	KECAMATAN KEMAYORAN	Jl. Serdang III Rt. 006/05	25.-	5510	3703	1985	4	2018 (Rehab Berat)		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Kemayoran	Jalan Kepu Barat No 5		948	700	1990	3	2019 (Rehab Berat)		√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Kebon Kosong	Jl Dakota 5	36/1987	602	790	2010	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
3	Kelurahan Harapan Mulia	Jl. Cempaka Wangi II No 17 RT 011 /09 Kel Harapan Mulia Kecamatan Harapan Mulia	SHP No 575	950	790	1989	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
4	Kelurahan Serdang	Jl. Bendungan Jago No. 11 RT. 013/02	-	1266	790	2007	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
5	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	Jl. Kran Raya No 77 RT 01 RW 06	-	593	790	2011	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
6	Kelurahan Cempaka Baru	Jl. Cempaka Baru II No. 1 RT 008 RW 06 Kel Cempaka Baru		671	790	1968/2007	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
7	Kelurahan Sumur Batu	Jl. Howitzer Raya No.5 RT.010 RW.06 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat	No. 09.07.02.0 6.4.00.009	875	790	2011	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
8	Kelurahan Utan Panjang	Jl.D Bendungan Jago No.49	NO.3 (4 Juli 1995)	881	762	1990	3	2015 (Rehab Berat)	√			Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
IV	KECAMATAN SEZEN	Jl. Kramat Raya No 114 Kel. Kwitang	No. 309	2390	2140	2011	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Senen	Jl. Senen Dalam IV		625	900	2015	3	-		√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Kenari	Jl. Jambrot Nomor 12	Hak Pakai No.63	1243	722,28	2015	4	-		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFIKAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				R B	R R	R S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Kelurahan Paseban	Jl. Paseban Raya No. 71 F - G	54	1054	583	2013	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
4	Kelurahan Kramat	Jl. Kramat Pulo Dalam II RT 001/06	Hak Pakai No 168	900	798	2019	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
5	Kelurahan Kwitang	Jl. Kramat IV Ujung		1300 M2	1300 M2		3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
6	Kelurahan Bungur	Jl. Kp. Kepu Gg. V No. 277		1088	518	2003	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
V	KECAMATAN CEMPAKA PUTIH	JL. Komplek Perkantoran Rawa Kerbau No.3, Kel. Cempaka Putih Timur	487/Th. 2005	3000	2140	2005	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Cempaka Putih Timur	Jl Cempaka Putih Tengah XIII	520	1189	790	2015	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Cempaka Putih Barat	Jl. Cempaka Putih Barat No. 25		1058	790		4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
3	Kelurahan Rawasari	JL. Pramuka Sari I NO.1 RT.014 RW.08	P.284/1989	1590	583	2014	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
VI	KECAMATAN MENTENG	Jl. Pegangsaan Barat No. 14	P.526/1985 2675 M2	2516	2262		7			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Menteng	Jl. Anyer No. 9		1163	583		3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Pegangsaan	Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 Pegangsaan	P.26/1981	386	583	2001	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
3	Kelurahan Cikini	Jl. Cikini VIII/7 RT. 006 RW. 01	HP. No. 19	628	790	1985	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
4	Kelurahan Gondangdia	Jalan Jambu No 2 A RT 005/RW 02 Kelurahan Gondangdia	SHP 25/1981	735	721	31/12/1971	4			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFIKAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TAHUN TERAKHIR DIREHAB	KONDISI FISIK			KETERANGAN
				TANAH (M ²)	BANGUNAN (M ²)				R B	R R	R S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Kelurahan Kebon Sirih	Jl. Jaksa No. 8	-	1082	790	2005	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
VII	KECAMATAN TANAH ABANG	Jl. KH. Mas Mansyur No. 130 Kota Adm. Jakarta Pusat	P.85/1989	2383	2012	2000	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Gelora	Jl. Gerbang pemuda No.1	P 30/81	1745	699	1991	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Bendungan Hilir	Jl. Penjernihan 1 No. 29 B	385	748	835	2012	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
3	Kelurahan Karet Tengsin	Jl. Karet Pasar Baru Barat II No.7	P.64/81	968	790	2012	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
4	Kelurahan Petamburan	Jl. Jl. Petamburan II No.58	P.84/1997	1010	835	2012	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
5	Kelurahan Kebon Melati	Jl. Lontar Raya No.3 RT. 01/14	-	960	442	2000	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
6	Kelurahan Kebon Kacang	Jl. KH.Mas Mansyur No. 30		1000	750	2016	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
7	Kelurahan Kampung Bali	Jalan Kampung Bali V/8 Rt.005/Rw.08	P.84/66	566	1016,7	2014	4			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
VIII	KECAMATAN JOHAR BARU	Jl. Johar Baru Utara I RT. 013 RW. 03	-	2535	2140	2012	4	2012		√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
1	Kelurahan Johar Baru	Jl. Johar Baru Utara III RT. 003 RW. 03	-	1281	1050	2004	3			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
2	Kelurahan Tanah Tinggi	Jl. Kramat Jaya Baru F/I NO. 290 RT. 007 RW. 010	Sertifikat No. P.29/1981	968	1050	1981	3			√		Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
3	Kelurahan Kampung Rawa	Jl.Rawa Selatan III/39 RT. 004 RW. 05	Sertifikat No. 082/1259	1097	835	2012	4	1982		√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)
4	Kelurahan Galur	Jl. Galur Jaya No. 36 RT 001/04	-	1100	576	2001	3			√		Non Standar (Berdasarkan Pergub No 26 Tahun 2013)

Keterangan RB = Rusak Berat, RR = Rusak Ringan, RS = Rusak Sedang

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 8 (delapan) Kantor Kecamatan dan 44 Kantor Kelurahan dengan rincian Kantor Kecamatan terdapat 0 (nol) yang kondisi fisiknya Rusak Berat, 0 (nol) Kantor Kecamatan yang Rusak Sedang dan 8 (delapan) Kantor Kecamatan yang Rusak Ringan, sedangkan rincian Kantor Kelurahan terdapat 1 (satu) yang kondisi fisiknya Rusak Berat yaitu Kelurahan Utan Panjang, 0 (nol) Kantor Kelurahan yang Rusak Sedang dan 43 Kantor Kelurahan yang Rusak Ringan.

Selanjutnya, untuk Aset/Modal berupa Rumah Dinas Camat dan Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat tergambar pada tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13 Jumlah Aset/Modal Menurut Rumah Dinas Camat dan Rumah Dinas Lurah

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFI KAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNA N	JUMLA H LANTA I	TAHUN TERAKHI R DIREHAB	KONDISI FISIK				KETERANGAN
				TANA H (M ²)	BANGUN AN (M ²)				BAIK	RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	KECAMATAN GAMBIR	NIHIL											Rudin sudah dihapus tetapi SK penghapusan belum ada
1	Kelurahan Gambir	NIHIL											
2	Kelurahan Cideng	Jl. Petojo Selatan IX No.8 RT 007 RW 011	Di huni	110	80	1981	1	-	√	-	-	-	-
3	Kelurahan Petojo Utara	Jln Petojo Selatan II	Di huni	177	383	2011	2	-	√	-	-	-	-
4	Kelurahan Petojo Selatan	Jl. Petojo Melintang	Di huni	-	54	1900	1	-	√	-	-	-	Luas tanah rumah Dinas menjadi satu dengan Luas Tanah Kantor Kelurahan sehingga satu sertifikat
5	Kelurahan Kebon Kelapa	Jl. Batu Tulis VII No. 21 RT. 006/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat	Di huni	-	100	2013	2	-	√	-	-	-	Tanah satu bidang dengan Kantor Kelurahan Kebon Kelapa

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFI KAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNA N	JUMLA H LANTA I	TAHUN TERAKHI R DIREHAB	KONDISI FISIK				KETERANGAN
				TANA H (M ²)	BANGUN AN (M ²)				BAIK	RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Kelurahan Duri Pulo	Jln Morotai No. 10 Kelurahan Cideng	Di huni	161	126	1992	2	-	-	-	-	√	Sertifikat masih di pegang oleh Suban Aset Jakarta Pusat
II.	KEC. SAWAH BESAR	Jl. Mangga Dua Dalam Blok K No. 3 RT 001 RW 012 Kel Mangg Dua Selatan	Tidak di huni	226	120	2004	1	-	-	√	-	-	-
1	Kelurahan Pasar Baru	JL. Pintu Air I No. 6	Tidak di huni	300	100	1988	1	-	-	√	-	-	-
2	Kelurahan Karang Anyar	JL. F Karang Anyar No. 11 RT. 007 / RW. 06	Di huni	120	80	1997	1	-	√	-	-	-	-
3	Kelurahan Kartini	Jl. Laksana B4 No. 27 RT. 008/06	Di huni	230	200	1996	1	-	√	-	-	-	-
4	Kelurahan Gunung Sahari Utara	Jl. Serdang I, No.6, RT.06 / RW.05, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat	Di huni	150	70	2001	1	-	√	-	-	-	Dokumen tidak ada tapi fisik dikuasai
5	Kelurahan Mangga Dua Selatan	Jl. Mangga Dua Dalam I	Di huni	120	85	1990	1	-	√	-	-	-	-
III	KECAMATAN KEMAYORAN	Jl. Serdang III Rt. 006/05	Di huni	400	300	1983	1	-	-	-	-	√	mengalami kerusakan di beberapa sisi
1	Kelurahan Kemayoran	Jalan Serdang I	Di huni	90	70	1985	1	-	√	-	-	-	-
2	Kelurahan Kebon Kosong	Jl Dakota 5	Di huni	120	118	1974	1	-	√	-	-	-	-
3	Kelurahan Harapan Mulia	Jl. Cempaka Wangi III No 46 RT 010 /09 Kel Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran	Di huni	210	120	1995	1	-	√	-	-	-	Saat ini sampai dengan akhir Desember 2019 Rumah Dinas dipinjam untuk dipakai oleh pegawai BPN sebagai tempat untuk pengukuran batas tanah kegiatan PTSL

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFI KAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNA N	JUMLA H LANTA I	TAHUN TERAKHI R DIREHAB	KONDISI FISIK				KETERANGAN
				TANA H (M ²)	BANGUN AN (M ²)				BAIK	RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Kelurahan Serdang	Jl. Serdang Baru Raya No. 2 RT. 017/05	Sendiri	285	70	2018	1	-	√	-	-	-	-
5	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	NIHIL											
6	Kelurahan Cempaka Baru	Jl. Cempaka Baru II No. 1 RT 008 RW 06 Kel Cempaka Baru	Rudin Lurah	210	180	1982	1	-	√	-	-	-	-
7	Kelurahan Sumur Batu	Jl. Sumber Pelita RT.005 RW.01 Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat	Tidak dihuni	231	100	1989	1	-	-	√	-	-	-
8	Kelurahan Utan Panjang	Jl.F Raya No.207A RT.008/04	Di huni	250	180	-	1	-	-	√	-	-	-
IV	KECAMATAN SENEN	Jl. Kalibaru timur IV No. 24 Kel Bungur Kec Senen	Di huni	253	290	-	2	-	-	-	-	√	-
1	Kelurahan Senen	Jl. Taruna 14 No. 2, Serdang	Di huni	-	474	-	1	-	√	-	-	-	Hanya tercatat pada KIB C
2	Kelurahan Kenari	Jl. Taruna Gg.14 RT.016/RW.003, Kelurahan Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10650	Di huni	474	120	2012	1	-	√	-	-	-	Hanya tercatat pada KIB C
3	Kelurahan Paseban	NIHIL											
4	Kelurahan Kramat	Jl. Kramat Sentiong Gg. Mesjid Rt. 009, Rw. 06	Di huni	105	108	1975	2	-	-	-	-	√	-
5	Kelurahan Kwitang	Jl. Percetakan Negara II No.37 Kel. Johar Baru	Di huni	130	90	2000	1	-	√	-	-	-	-
6	Kelurahan Bungur	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RW. 01 Kwitang	Di huni	230	230	-		-	-	-	-	√	Terdapat ketidaksesuaian pencatatan luas

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFI KAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNA N	JUMLA H LANTA I	TAHUN TERAKHI R DIREHAB	KONDISI FISIK				KETERANGAN
				TANA H (M ²)	BANGUN AN (M ²)				BAIK	RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	KECAMATAN CEMPAKA PUTIH	Jl. Kalibaru Timur I No.26 RT.008/06	Di huni	215	215	1997	1	-	√	-	-	-	bangunan dalam KIB dengan dilapangan Tercatat di KIB A dan KIB C
1	Kelurahan Cempaka Putih Timur	Jl. Cempaka Putih Tengah XVII No. 16 A, Kel. Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih	Tidak di huni	150	120	1987	1	-	-	√	-	-	-
2	Kelurahan Cempaka Putih Barat	Jl. Rawasari Barat	Tidak di huni	1203	55	1987	1	-	-	√	-	-	-
3	Kelurahan Rawasari	Jl. Johar Baru Utara III RT. 001/03	Di huni	130	60	-	1	-	-	√	-	-	-
VI	KECAMATAN MENTENG	NIHIL											
1	Kelurahan Menteng		Di huni	312	282	-	2	-	√	-	-	-	-
2	Kelurahan Pegangsaan	NIHIL											
3	Kelurahan Cikini	Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 Kel pegangsaan	Di huni	148	236	2007	2	-	√	-	-	-	-
4	Kelurahan Gondangdia	Jalan Kali Pasir Gang Tembok Nomor 28 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat	Di huni	200	194	30/06/1905	1	-	√	-	-	-	-
5	Kelurahan Kebon Sirih	NIHIL											
VII	KECAMATAN TANAH ABANG	Jalan Jaksa No. 8	Di huni	80	383	2012	2	-	√	-	-	-	-

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALAMAT	NO. SERTIFI KAT	LUAS		TAHUN PEMBANGUNA N	JUMLA H LANTA I	TAHUN TERAKHI R DIREHAB	KONDISI FISIK				KETERANGAN
				TANA H (M ²)	BANGUN AN (M ²)				BAIK	RB	RR	RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelurahan Gelora	Jl. Benhil Raya No. 146 Kota Adm. Jakarta Pusat	Di huni	467	126	27/05/1905	1	-	√	-	-	-	-
2	Kelurahan Bendungan Hilir	Jl. Karet Pasar Baru	Di huni	-	150	1990	1	-	-	√	-	-	-
3	Kelurahan Karet Tengsin	NIHIL											
4	Kelurahan Petamburan	Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 17	Tidak di huni	60	60	2012	1	-	√	-	-	-	-
5	Kelurahan Kebon Melati	Jl. H. M.Sani	Di huni	296	73	2018	1	-	√	-	-	-	Tanah SDN 05 dan 07 Petamburan
6	Kelurahan Kebon Kacang	Jl. Karet Pasar Baru Barat 7	Di huni	150	80	2012	1	-	√	-	-	-	-
7	Kelurahan Kampung Bali	Jl. Karet Pasar baru Barat	Di huni	70	60	1983	1	-	-	-	-	√	Permohonan copy sertifikat/dokumen sudah diajukan ke BKAD Prov DKI Jakarta
VIII	KECAMATAN JOHAR BARU	Jl. Kampung Bali IX No.9 Rt.009/RW.09	Di huni	179	80	1991	1	-	√	-	-	-	-
1	Kelurahan Johar Baru	JL. Kampung Rawa Selatan RT. 011 RW. 02	Di huni	300	250	1990	2	-	-	√	-	-	-
2	Kelurahan Tanah Tinggi	JL. Johar Baru Utara RT. 003/03	Di huni	90	80	1981	1	-	√	-	-	-	Pernah diusulkan ke SUBAN ASSET Tahun 2018 namun tidak ada tindak lanjutnya
3	Kelurahan Kampung Rawa	JL. Rawa Sawah IV RT. 002/02	Tidak di huni	140	115	1987	1	-	-	√	-	-	-
4	Kelurahan Galur	JL. Johar Baru Utara RT. 003/03	Di huni	90	90	1998	1	-	-	-	-	√	Belum diusulkan
		JL. Johar Baru Utara RT. 003/03	Tidak di huni	90	54	1990	1	-	√	-	-	-	Pernah diusulkan ke SUBAN ASSET Tahun 2018 namun tidak ada tindak lanjutnya

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat

Untuk mendukung tugas-tugas Kota Administrasi, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Administrasi. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi yaitu peralatan komputer/telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi

Tabel 14 Jumlah Aset/Modal Peralatan dan Mesin di Kantor Walikota

NO.	JENIS ASSET	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
				RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Roda 4						
	a. Mobil	2002 s.d 2019	20	-	√	√	-
2	Kendaraan Roda 2						
	a. Sepeda motor	2003 s.d 2019	7	-	√	√	-
3	Kapal Dinas	-	-	-	-	-	-
4	AC Casette	-	2 Titik	-	-	√	RSGU dan RSGB
5	AC Chiller	-	2	-	-	√	-
6	AC Split	2011 s.d 2019	33	-	√	-	-
7	AC Split Duck	-	90	-	√	√	-
8	AC PorTabel	2011 s.d 2018	11	-	√	-	-
9	Komputer	2011 s.d 2019	33	-	√	√	-
10	Genset	-	3	-	√	-	-
11	Printer	2007 s.d 2019	29	-	√	-	-
12	APAR	-	152	-	-	√	-
13	CCTV	2012 s.d 2019	65	-	-	-	DVR/NVR ada 8 unit

Keterangan: RB=Rusak Berat, RS=Rusak Sedang, RR=Rusak Ringan

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat

Selanjutnya untuk aset/modal aset lainnya (lahan) di Kota Administrasi Jakarta pusat tidak ada (nihil) seperti yang tergambar pada tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15 Jumlah Aset/Modal Aset Lainnya (Lahan)

NO.	A L A M A T	NO & TANGGAL SERTIFIKAT	LUAS LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN SESUAI KONDISI EXISTING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					

N I H I L

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat

II.3. Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gambaran Capaian indikator kinerja dan realisasi Kota Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada periode 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17

II.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Periode 2017-2022

No	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN					REALISASI					CAPAIAN (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	-	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	100	100	100	
2	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	-	75	80	85	-	-	55	55	55	-	-	73,33	68,75	64,71	
3	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	-	15	15	15	-	-	13	13	13		-	86,67	86,67	86,67	
4	Jumlah Kawasan yang Tertata	-	4	4	4	-	-	N/A	N/A	N/A		-	N/A	N/A	N/A	
5	Persentase Capaian Penyenggaraan Pemerintahan Kelurahan	-	85	90	90	-	-	90,77	89,37	96,14		-	100	99,30	100	
6	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	85	90	95	-	-	95,93	89,36	96,41		-	100	99,29	100	
7	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	-	70	80	90	-	-	100	100	90		-	100	100	100	
8	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi	-	100	100	100	-	-	100	100	100		-	100	100	100	
9	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	-	100	100	100	-	-	100	100	100		-	100	100	100	
10	Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	88	90	91	-	-	81,39	79,25	N/A		-	92,49	88,06	N/A	
11	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80%	-	90	90	100	-	-	85,5	99,06	100		-	95	100	100	

No	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN					REALISASI					CAPAIAN (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	-	4	4	4	-	-	4	4	4		-	100	100	100	
13	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	-	4	4	4	-	-	3	4	4		-	75	100	100	
14	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	-	100	100	100	-	-	100	100	100		-	100	100	100	
15	Persentase Jumlah Wirausaha Baru yang Tercapai	-	100	100	100	-	-	66	100	100		-	66	100	100	
16	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	-	100	100	100	-	-	100	100	100		-	100	100	100	
17	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	-	100	100	100	-	-	100	100	100		-	100	100	100	
18	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	-	100	100	100	-	-	100	100	100		-	100	100	100	
19	Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS	-	100	100	100	-	-	100	100	100		-	100	100	100	
20	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	4	4	4	-	-	3	3	4		-	75	75	100	

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Tabel 16 di atas, dapat diketahui bahwa pada periode 2017-2022 indikator ukuran keberhasilan pelayanan Kota Administrasi yang bersumber dari dokumen Lakip belum seluruhnya menggambarkan pelayanan Kota Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa indikator bersifat komposit menggambarkan keberhasilan pelayanan OPD teknis, sehingga tidak dapat mengukur keberhasilan Kota Administrasi. Dalam perspektif kedepan, perumusan indikator ukuran keberhasilan pelayanan Kota Administrasi akan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan ukuran pelayanan yang dapat mengukur pelayanan Kota Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II.3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 17 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Periode 2017-2022

Program	Nama Program	TAHUN ANGGARAN 2018				TAHUN ANGGARAN 2019				TAHUN ANGGARAN 2020				TAHUN ANGGARAN 2021			
		Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Jumlah SK	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)
4.01.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	667	393.570.600.045	365.110.608.050	92,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.02	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	15	16.346.749.600	13.360.643.834	81,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.03	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat	484	69.096.531.249	54.500.540.997	78,88	603	85.771.542.259	73.293.027.750	85,45	382	44.543.350.781	40.982.101.123	92	-	-	-	-
4.01.04	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat	106	4.091.078.516	2.551.313.512	62,36	159	9.651.926.165	5.933.445.133	61,47	157	4.326.237.340	3.534.123.242	81,69	-	-	-	-
4.01.29	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	50	2.421.309.549	1.866.559.065	77,09	438	181.824.195.950	172.219.905.129	94,72	278	145.895.130.414	144.921.865.103	99,33	-	-	-	-
5.01.30	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	275	265.925.175.602	249.462.206.087	93,81	267	237.795.558.117	229.414.135.483	96,48	-	-	-	-
5.01.28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	45	3.200.716.342	2.425.778.533	75,79	30	872.203.548	863.623.308	99,02	-	-	-	-

Program	Nama Program	TAHUN ANGGARAN 2018				TAHUN ANGGARAN 2019				TAHUN ANGGARAN 2020				TAHUN ANGGARAN 2021			
		Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Jumlah Keg	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Jumlah Keg	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Jumlah SK	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)
A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	300.897.751.889	294.012.545.607	97,71
A.7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	142.617.291.543	140.959.855.870	98,84
A.7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	8.277.551.038	6.122.581.724	73,97
B.7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	188.123.581.792	183.835.142.488	97,72
B.7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	41.512.088.258	35.357.022.827	85,17
B.7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	2.004.294.822	1.960.466.380	97,81
JUMLAH		1322	485.526.268.959	437.389.665.458	90,09	1520	546.373.556.318	503.334.362.632	92,12	1114	433.432.480.200	419.715.848.259	96,84	944	683.432.559.342	662.247.614.896	96,9
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1	277.605.919.000	264.571.896.676	95,3	1	268.567.469.000	259.849.507.293	96,75	1	177.554.199.456	158.231.859.732	89,12	1	249.064.037.302	236.738.360.759	95,05
JUMLAH		1.323	763.132.187.959	701.961.562.134	91,98	1.521	814.941.025.318	763.183.869.925	93,65	1.115	610.986.679.656	577.947.707.991	94,59	945	932.496.596.644	898.985.975.655	96,41

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Terdapat 5 (lima) Program Utama yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat (2018), Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (2018), Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat (2019-2022), Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (2019-2022), serta Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (2019-2022). Selain itu terdapat 2 (dua) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD (2018-2022) dan Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD (2018-2022).

Pada tahun 2018, terdapat perbedaan program yang digunakan untuk tahun 2019-2022 di dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022. Hal ini dikarenakan pada proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dilakukan pada tahun 2017 dan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berlangsung sampai dengan tahun 2018 sehingga landasan penggunaan Program Tahun 2018 adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

Selain adanya perbedaan Program tersebut, pada Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2020 juga perbedaan target indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) sehingga dalam melakukan evaluasi, data capaian tersebut tidak dapat disandingkan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan kegiatan, yang awalnya Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 5 (lima) Program yang diampu di Tahun 2020, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2021 menjadi 3 (tiga) Program yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu Program Pengelolaan Kecamatan (A.7.01.02), Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah (A.7.02.01), dan Program Pengelolaan Kota Administrasi (A.7.02.02).

Selanjutnya terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga pada tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 6 (enam) Program yang diampu yaitu Program Pengelolaan Kecamatan (A.07.01.02), Program Pengelolaan Kota Administrasi (A.07.02.02), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (A.X.XX.01), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (B.07.01.02), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (B.07.01.03), dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (B.07.01.06).

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Administrasi akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Administrasi menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kota Administrasi dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kota Administrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, antara lain adalah:

II.4.1. Tantangan

A. Percepatan Transformasi Digital di Segala Aspek pada Masa Pandemi

Semenjak WHO menetapkan COVID-19 menjadi pandemi global, banyak aspek kehidupan yang terdampak tak terkecuali pelayanan publik. Berangkat dari berbagai keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di masa pandemi, termasuk pelayanan yang diberikan oleh bagian hukum setko administrasi, menuntut percepatan

transformasi dari manual tatap muka atau luar jaringan menjadi online atau dalam jaringan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bagi yang cepat beradaptasi secara perlahan akan mampu mengatasi. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengendalikan situasi maka akan berdampak besar kepada organisasi serta produk pelayanan yang dihasilkan. Masa pandemi telah mempercepat terjadinya transformasi digital berbagai aspek, sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat menuju ke pola hidup digital dalam berinteraksi dan aktivitas kehidupan sehari-hari, Hal ini mendorong institusi-institusi yang menangani urusan hukum untuk menyesuaikan diri dalam penggunaan teknologi digital baik dalam pelayanan internal ke pegawai maupun ke masyarakat dalam proses penyelesaian perkara agar tetap berjalan dan terlayani lebih baik, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah selaku lembaga eksekutif yang berkewajiban memberi pelayanan kepada masyarakat wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang aman dan nyaman di situasi apapun.

Di situasi pandemi yang semakin mencekam ini perlu adanya inovasi di bidang pelayanan publik terkait pelayanan hukum untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan serta para ASN sebagai pemberi pelayanan sehingga pelayanan hukum tetap dapat diberikan dengan maksimal. Transformasi digital dianggap menjadi sebuah kunci dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kondisi pandemi ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi agar para pegawai di setiap bagian yang ada di lingkup setko administrasi umumnya dan pegawai pada bagian hukum khususnya bisa menciptakan strategi yang inovatif dan lebih produktif. Selain itu, masyarakat juga akan mengerti bahwa transformasi ini memberikan pengaruh positif yang signifikan dapat berinteraksi dengan lebih dekat secara digital, mengingat yang menjadi cakupan layanan bagian hukum setko administrasi penduduk Kota Administrasi yang berjumlah sebanyak ±924.686 jiwa dengan perbandingan 460.885 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 463.801 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 19,21 jiwa/km² yang tersebar di 8 kecamatan dan 44 kelurahan.

B. Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum

Sebagai wilayah administrasi di pusat Ibu Kota Negara, Wilayah Kota Administrasi tidak terlepas dari tantangan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum. Dalam konteks ini gangguan keamanan dapat berasal dari gangguan kriminal, dan gangguan keamanan yang bersifat politis dan gangguan ketertiban umum yang dilakukan oleh oknum ataupun sekelompok orang-orang tertentu. Salah satu potensi yang berkontribusi terhadap peningkatan gangguan kriminal dan ketertiban umum sekarang ini adalah masa pandemi covid-19 baik di Jakarta maupun Indonesia.

Berdasarkan data menurut Satgas Covid-19, DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi, dan ini membuat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jakarta kembali naik level yang perlu diwaspadai. Kondisi pandemi ini berdampak sekali terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti munculnya tindak kejahatan, pelanggaran, gangguan dan bencana dengan banyak jenis seperti gangguan yang terjadi terhadap orang yakni penemuan mayat, bunuh diri, kecelakaan, kebakaran maupun kehilangan dan faktor yang dominan mempengaruhi adalah kehidupan ekonomi saat pandemi COVID-19.

Di tataran rumah tangga dan masyarakat, dimana 50% diantaranya mengalami kesulitan keuangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan karena kegiatan bisnis yang lesu akibat dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menyebabkan berkurangnya pemasukan rumah tangga, disaat harga berbagai kebutuhan sehari-hari meningkat membuat semua cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya berakibat banyak pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa PPKM ini dan mengganggu ketertiban umum, hulunya akan menjadi permasalahan hukum yang penanganannya melibatkan bagian hukum untuk wilayah.

Sedangkan gangguan yang bersifat politis dapat terjadi karena di wilayah Kota terdapat banyak pusat-pusat kegiatan strategis yang menjadi intervensi pusat maupun provinsi dan asset-asset penting serta sebagian besar kementerian dan lembaga tinggi negara serta kediaman pejabat tinggi negara maupun kediaman perwakilan negara berada di sehingga dapat berpotensi menarik minat kelompok tertentu yang

ditanggunggi kepentingan politis untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan.

C. Pemenuhan Layanan Dasar

Dunia saat ini sedang diuji oleh kehadiran gelombang pandemi. Sebuah kondisi yang sebelumnya tidak pernah terprediksi. Seluruh aspek kehidupan kita dipukul mundur oleh pandemi corona. Secara kasat mata, dapat terlihat bahwa saat ini kondisi kehidupan masyarakat Indonesia belum pulih sepenuhnya seperti masa-masa sebelum pandemi. Kondisi pandemi yang melanda dunia juga dialami Indonesia disaat negara ini juga tengah berproses mempersiapkan perpindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta menuju Kalimantan.

Pandemi yang melanda dunia dan rencana pemindahan ibukota tentu memiliki dampak signifikan bagi Kota Jakarta. Adanya pandemi membuat Pemerintahan Kota Jakarta dan masyarakat Jakarta harus bersiap menghadapi kondisi kedepan menjawab tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Kondisi pandemi membuat masyarakat harus memiliki ketahanan, kesehatan utuk tetap bisa beraktifitas, bekerja utuk mempercepat laju peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, setelah Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan yang tentunya akan berdampak kepada hampir seluruh sektor baik sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola pemerintahan daerahnya, berpotensi memengaruhi upaya percepatan laju peningkatan kesejahteraan bagi rakyat atau masyarakatnya.

Entitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga meliputi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan upaya dalam menghadapi isu pandemi dan pemindahan ibukota melalui analisis perencanaan yang menjangkau kedua isu strategis sebagaimana dimaksud. Dari berbagai tantangan yang timbul khususnya terkait isu di bidang kesejahteraan rakyat tentu perlu dilihat sebagai potensi untuk dapat memajukan kota Jakarta menjadi lebih sejahtera. Tantangan dari aspek kesehatan dengan adanya pandemi seperti saat ini menuntut Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, tanpa kecuali Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk terus melakukan upaya-upaya dalam penanganan dan peningkatan cakupan Vaksinasi covid 19. Hal tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan herd immunity masyarakat

dan pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan berbagai kolaborator untuk ikut terlibat dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi covid 19.

Selain aspek kesehatan, tantangan dari aspek sosial juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kondisi sosial masyarakat Jakarta saat ini masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan dan pandemi Covid-19 memperparah kondisi tersebut. Namun, dalam penanganan kelompok miskin tersebut pemerintah Pusat dan Daerah masih terkendala dalam melakukan sinkronisasi data penerima manfaat sehingga masih ditemukan adanya penerima manfaat program penanganan kemiskinan yang belum tepat sasaran. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, tentunya ke depan pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sinkronisasi data kesejahteraan sosial (DTKS) antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terbentuk satu data yang terintegrasi dan terpadu.

Disamping kedua aspek diatas, pandemi telah mengubah institusi pendidikan kita dan secara total mengubah model pendidikan yang sebelum pandemi umumnya dilakukan secara tatap muka. Dalam hal ini Pemerintah menggeser suasana belajar dari ruang-ruang kelas menuju ruang-ruang maya setelah diterapkannya kebijakan belajar dari rumah melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pandemi pada gilirannya menuntut perubahan wajah pendidikan kota Jakarta agar lebih siap melaksanakan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komputer (TIK) dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara di sisi lain, Jakarta juga harus menjawab tantangan terkait rencana pemindahan ibukota yang berpotensi menurunkan pendapatan kota Jakarta di sektor pajak yang berimbas pada kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan sarana prasarana pendidikan yang lebih berkualitas.

Selain bidang pendidikan, bidang budaya juga tak kalah penting dan perlu menjadi perhatian khusus. Pemindahan ibukota negara memberi peluang masyarakat Jakarta menemukan kembali dan memperkuat budaya asli masyarakat Jakarta. Namun, berkembangnya budaya digital di tengah masyarakat membutuhkan kemampuan dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan adaptasi budaya, serta penanaman nilai-nilai mental spiritual disaat era digital melesat dengan cepat setelah dipicu pandemi, sehingga perlu adanya strategi kebijakan agar nilai-nilai luhur itu semua tidak terkikis.

Selain kesehatan dan pendidikan, dimensi layanan dasar juga menyangkut rumah tinggal. Rumah menjadi salah satu infrastruktur kota yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, karena merupakan tempat aktivitas utama masyarakat Kota Administrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada Tahun 2019 hanya 47,12 % masyarakat yang tinggal di kediaman sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap kepemilikan rumah masih sangat sulit bagi masyarakat DKI Jakarta, dan khususnya. Penyediaan perumahan yang terjangkau merupakan salah satu tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang ada.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, tercatat ada 98 RW Kumuh di Kota Administrasi yang tersebar di 7 Kecamatan, dengan Kecamatan Johar Baru memiliki RW Kumuh terbanyak. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta melalui program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Hingga Tahun 2021, ditargetkan 38 RW Kumuh telah dilakukan peningkatan sarana prasarana permukimannya melalui program CAP dan CIP. Jumlah tersebut baru 38 % dari RW Kumuh yang ada di Kota Administrasi, sehingga perlu adanya strategi lain dan alternatif kegiatan dan pendanaan lain untuk segera menuntaskan masalah permukiman kumuh di Kota Administrasi.

D. Penataan Kawasan

Citra sebuah kota terbentuk dari ruang-ruang yang ada di dalam area/kawasan yang memiliki kekhasan karena adanya kesamaan karakteristik. Sebagaimana dengan munculnya kawasan permukiman kumuh, terdapat ruang-ruang kota di yang mengalami degradasi kualitas lingkungan, disebabkan oleh menurunnya kualitas sarana prasarana kota yang ada. Perubahan paradigma Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari transportasi yang berorientasi kendaraan pribadi menjadi ramah pejalan kaki menjadikan beberapa kawasan mengalami regenerasi. Hal tersebut salah satunya ditopang dengan adanya pembangunan infrastruktur penopang pejalan kaki dan sepeda yang dilakukan sepanjang Tahun 2018 –2020. Salah satu kawasan yang mengalami revitalisasi adalah Kawasan Cikini-Kramat, yang pada Tahun 2019 dilakukan perbaikan jalur pedestrian dan penataan utilitas kota dengan luas trotoar

terbangun mencapai 43.505 m², dilanjutkan pada ruas Jl. Raden Saleh mencapai 2.732 m² pada Tahun 2021. Penataan trotoar ini mampu mengubah Kawasan Cikini–Kramat menjadi salah satu destinasi baru bagi para masyarakat yang ingin mengeksplorasi. Akan tetapi kegiatan revitalisasi kawasan ini masih bertumpu pada kegiatan pembangunan fisik, sedangkan kegiatan revitalisasi kawasan semestinya dapat bermanfaat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi kawasan ini. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Kota Administrasi kedepannya dalam hal peremajaan kawasan adalah menentukan rencana strategis pengembangan aktivitas-aktivitas pendukung yang dapat membangkitkan kembali nilai atau citra kawasan tersebut.

E. Penanganan Banjir

Salah satu permasalahan utama di DKI Jakarta, adalah banjir. Berdasarkan kondisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam satu kota yang rawan mengalami banjir, demikian dengan. Terletak di antara area hulu Jakarta yang cenderung lebih tinggi dan hilir yang lebih rendah namun mengalami kenaikan permukaan air dan rentan mengalami banjir rob, sangat rentan menghadapi banjir. Salah satu peristiwa banjir yang cukup menghantam, terjadi pada tanggal 1 Januari 2020, dimana 62% Kelurahan di mengalami banjir, dengan total pengungsi mencapai 310 orang.

Gambar 5 Jumlah Kelurahan Terdampak dan Bebas banjir Per 1 Januari 2020



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

Gambar 6 Jumlah Pengungsi Banjir di Jakarta Per 1 Januari 2020

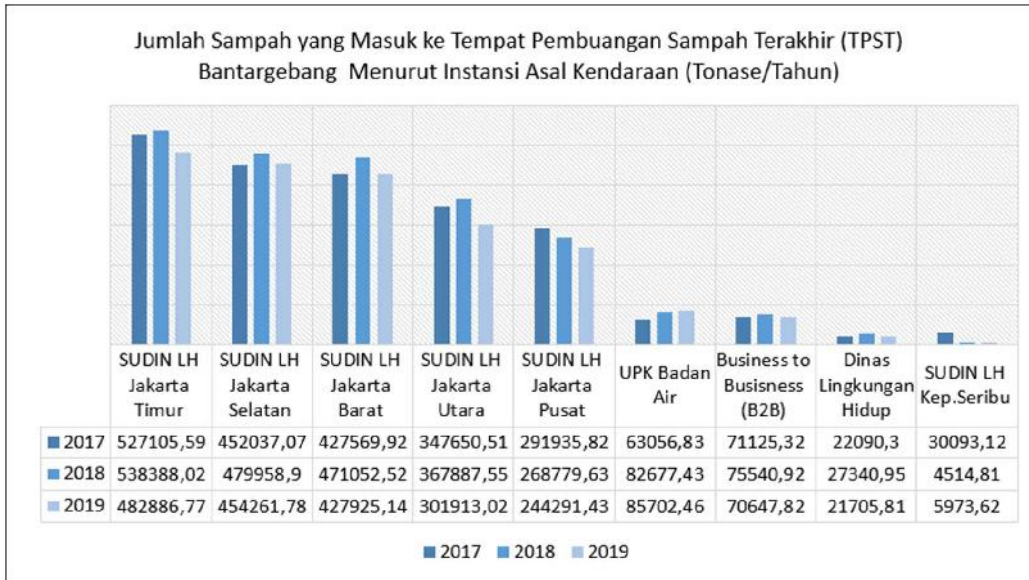


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

Guna penanganan banjir di Jakarta Pusat, banyak kegiatan yang telah dilakukan seperti pengerukan Kali/Sungai, pembangunan drainase vertikal serta pengadaan sarana pengendali banjir. Pada Tahun 2020 tercatat ada 113 RW Rawan Banjir dan turun hingga 33 RW Rawan Banjir pada Tahun 2021, dimana RW-RW Rawan Banjir tersebut telah mendapatkan kegiatan penanggulangan antisipasi banjir. Akan tetapi, berdasarkan hasil kejadian hujan pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu mempersiapkan strategi-strategi atas dampak terjadinya banjir rob yang disertai dengan hujan lokal dikarenakan kapasitas sarana penampungan air yang tidak mencukupi.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu kota, salah satu permasalahan yang muncul adalah bertambahnya volume sampah perkotaan. Di DKI Jakarta, rata-rata setiap warga memproduksi 0,7 kg per harinya. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan apabila seluruh sampah yang diproduksi ini akan berakhir di TPST Bantar Gebang yang kapasitasnya sudah mendekati maksimal. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Administrasi untuk mengurangi jumlah sampah yang harus berakhir di TPST Bantar Gebang, dan selama kurun waktu 2017– 2019 terdapat penurunan mencapai 16 %.

Gambar 7 Jumlah Sampah Masuk ke TPST Bantar Gebang Menurut Instansi Asal Kendaraan (Tonase/Tahun)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Guna mendukung pengurangan volume sampah ini, diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Warga. Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan pemilahan sampah sendiri, dan lebih mengaktifkan kembali bank sampah sebagai sarana penampungan sampah yang masih memiliki nilai guna. Berdasarkan hasil survey Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 32% sampah rumah tangganya adalah sampah anorganik yang dapat didaur ulang. Oleh karena itu, tantangan kedepannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah agar tidak seluruh sampah berakhir di TPST Bantar Gebang.

F. Perkembangan Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha yang tercipta atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 di Jakarta mencapai Rp 701,98 triliun. Bila dibandingkan dengan PDRBDKI Jakarta, nilai ini berada pada kisaran 25,15 persen dari PDRB DKI Jakarta. Dengan kontribusi yang sebesar ini dapat dikatakan perkembangan

perekonomian cukup mempengaruhi kondisi perekonomian Provinsi DKI Jakarta seperti pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18 Produk Domestik Regional Bruto

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,05	0,03
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0
C	Industri Pengolahan	6,46	3,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,4	1,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,07
F	Konstruksi	58,64	39,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110,53	65,38
H	Transportasi dan Pergudangan	14,37	9,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,8	21,23
J	Informasi dan Komunikasi	57,04	51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,81	112,01
L	Real Estate	41,56	27,88
M,N	Jasa Perusahaan	68,97	41,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	62,32	28,89
P	Jasa Pendidikan	38,69	23,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,31	8,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	24,95	15,73
Produk Domestik Regional Bruto		701,98	449,62

Sumber : Statistik Daerah Kota 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Rp 449,62 triliun. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 0,64 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya kasus pandemi Covid-19 yang di seluruh dunia, sehingga berdampak juga pada perekonomian di Provinsi DKI Jakarta termasuk di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tabel 19 Indikator Produk Domestik Regional Bruto

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	690,86	754,41	753,71
PDRB per Kapita Harga Konstan (Juta Rp)	458,76	487,57	482,75

Sumber : Statistik Daerah Kota 2021

Pada tahun 2020, PDRB per kapita mencapai 701,98 juta rupiah, meningkat bila dibandingkan tahun 2019 yang senilai 700,18 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2020 adalah 482,75 juta rupiah. Secara riil PDRB perkapita tahun 2020 minus 0,99 persen dibanding tahun sebelumnya adalah minus 0,09 persen.

II.4.2. Peluang

A. Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi

Adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar urusan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Pemerintah Daerah yang menjalankan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berupa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat dan pemukiman, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Lebih spesifik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan lingkup Wilayah Kota Administrasi. Kota Administrasi bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan.

B. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi pemerintah daerah, khususnya kota Administrasi untuk memanfaatkan teknologi sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan publik. Data BPS yang dirilis Tahun 2021 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta memiliki 77,61 % individu yang telah menggunakan internet. Selain itu, secara umum Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020. Pertumbuhan nilai IP-TIK Indonesia selama tahun 2019 hingga 2020 adalah sebesar 5,08 persen atau meningkat sebesar 0,27 poin dengan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IP-TIK tertinggi di Indonesia yaitu 7.46 meningkat dari tahun sebelumnya yakni 7,27. Kondisi demikian menjadi peluang bagi Kota Administrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti pada gambar 8 di bawah ini.

Gambar 8 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)



Sumber : bps.go.id

C. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan membangun masyarakat terkait erat dengan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat bertujuan memerangi kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif serta penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Salah satu pengembangan potensi manusia dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan berbasis kemasyarakatan. Kegiatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan permasalahan oleh masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di lingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah “masyarakat tidak dijadikan obyek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri”.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengajak warga berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai masalah, terutama mereka yang terdampak pandemi corona dengan meluncurkan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Program

tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi yang menyadari bahwa dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Lewat KSBB, Pemprov DKI mengajak masyarakat untuk saling menguatkan dan meringankan beban. Warga yang ingin berbagi akan dipertemukan dengan yang membutuhkan bantuan. Terlebih, pandemi berdampak besar terhadap sektor kesehatan dan ekonomi.

Ada 6 program KSBB yang kini sudah berjalan, yakni Pangan, UMKM, Pendidikan, Persampahan, Permukiman, dan Ketenagakerjaan. Sejauh ini, KSBB sudah berhasil menggaet banyak kolaborator. Pada prinsipnya peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam KSBB adalah menjadi penyedia platform kolaborasi menggabungkan antara warga yang ingin membantu dengan warga yang membutuhkan, penyediaan data kebutuhan, menghubungi narahubung di lokasi, dan memfasilitasi pemberian bantuan melalui Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah terkait, seperti Kecamatan dan Kelurahan. Ini merupakan peluang khususnya bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menyadari disrupsi akibat pandemi covid-19 masyarakat mencari cara-cara baru dalam mendefinisikan masa depan. Di saat cara lama tidak lagi relevan, kolaborasi membuka banyak kemungkinan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya untuk menata kembali masa depan.

D. Tumbuhnya Wirausaha Baru

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau lembaga dan/atau pihak lainnya serta menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Administrasi, meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, manfaat dari program tersebut :

1. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha.
2. Peluang kesempatan berwirausaha dan wirausaha naik kelas.
3. Terciptanya Wirausaha Baru di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Menciptakan pelaku wirausaha yang Tangguh memerlukan dukungan konkrit dari seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) termasuk didalamnya bantuan nyata dari Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Salah satu kebutuhan dasar pelaku usaha/UMKM antara lain adalah tempat berusaha yang sesuai, kondusif dan prospektif. Terkait dengan hal tersebut, aspek penataan Kawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sangat perlu untuk mempertimbangkan keberadaan UMKM ini secara update dan komprehensif agar iklim usaha yang tercipta benar-benar dapat mendukung pertumbuhan dan kelangsungan kegiatan ekonomi secara signifikan.

Keberadaan kantong-kantong pelaku UMKM yang dibina secara profesional dan tepat guna, baik dari aspek lokasi, tampilan, produk (jasa/barang) serta layanan yang diberikan diyakini selain membantu mengerakan sector ekonomi rakyat, pengelolaan dan pembinaan yang berkesinambungan juga dapat meminimalisir gangguan ketertiban umum yang sering berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL). Program penataan sarana usaha kawasan PKL, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota administrasi Jakarta Pusat antara lain adalah guna memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan, pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja, menciptakan tata ruang yang sesuai estetika dan menjaga ketertiban umum.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berkomitmen mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah masyarakat Ibukota. Para pelaku UMKM dan PKL didaftar dan dibina kedalam program Jakpreneur yang telah ada, program ini diharapkan menjadi platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. Jakpreneur dibentuk berdasarkan fakta bahwa DKI Jakarta menjadi rumah bagi kurang lebih sekitar 1,1 juta UMKM yang turut berkontribusi terhadap perekonomian dan penyediaan kebutuhan masyarakat

Jakarta. Disamping itu, UMKM juga memiliki andil besar dalam menyerap tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran.

Masyarakat yang mengikuti program Jakpreneur memiliki kesempatan memperoleh fasilitas agar dapat berkembang secara kolaboratif. Diantaranya, dengan memberikan akses terhadap fasilitas pendampingan berkala, pelatihan untuk memicu tumbuh kembang serta kreasi UMKM, akses permodalan ke perbankan/lembaga/pihak lainnya, pemasaran, serta legalitasnya dalam ruang kota. Pemerintah provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang kemudian lebih sering didengar dengan sebutan PKT agar proses kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat memiliki perlindungan/payung hukum yang jelas.

Jakpreneur turut memfasilitasi UMKM dalam ruang kota, baik ruang publik maupun ruang privat yang terstandarisasi dan berkualitas, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Para pelaku usaha/UMKM dapat mendaftar online melalui situs <https://jakpreneur.jakarta.go.id> dan membawa dokumen asli ke Kecamatan atau ke tempat Pelatihan Instansi Pemprov DKI Jakarta yang telah ditentukan dan apabila terkendala mendaftar online, calon binaan Jakpreneur dapat mendatangi Sekretariat Jakpreneur di masing-masing Kecamatan untuk dibantu oleh petugas pendamping.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap RPD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi kedepan, yang selanjutnya tahapan tersebut akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi periode 2023-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

III.1.1. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Sementara itu Kota Administrasi berkedudukan sebagai perangkat yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks

pelayanan kepada warga masyarakat. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 20 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya <i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

Sumber : FGD Tim Penyusun Renstra (diolah)

III.1.2. Permasalahan Pelayanan di Bagian-Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Pemendagri No. 86 Tahun 2017 identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja *outcomes* periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal, namun demikian dalam konteks ini Kota Administrasi indikator periode lalu yang digunakan berbeda beda tiap tahunnya. Oleh karena itu pada bagian ini identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator *outcomes* sebagaimana diuraikan pada Bab II terdahulu, melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi (program kegiatan) Renstra Kota Administrasi pada Bab VI. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah ini. Penjabaran lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 21 Identifikasi Permasalahan Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK.
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan;
2	Bagian Hukum	1. Belum optimalnya pelayanan pengurusan perkara di pengadilan di wilayah Kota Administrasi ;	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kota;
		2. Belum optimalnya pelayanan sengketa pertanahan di wilayah Kota Administrasi ;	2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota;
		3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia	3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan publik;	1. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi pelayanan publik.
		2. Belum tersusunnya proses bisnis Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;	2. Melakukan penyusunan di tingkat Kota Administrasi dan mengajukan usulan ke tingkat provinsi untuk dilakukan harmonisasi dengan semua SKPD terkait
		3. Pengelolaan perpustakaan dinas yang berada di bawah tupoksi sub bagian Tatalaksana dianggap sudah tidak diperlukan lagi mengingat anggaran penyediaan buku dipusatkan di Dinas/ Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan buku-buku yang	3. Dilakukan kajian/ telaah untuk penghapusan tugas pokok dan fungsi dalam evaluasi Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi mendatang

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		diperlukan untuk menambah kompetensi pegawai tidak bisa disediakan oleh perpustakaan dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat (tidak ada anggaran);	
		4. Tingkat pemahaman pegawai terhadap sistem dan aplikasi manajemen kinerja pegawai belum merata;	4. Penempatan pejabat pengelola kepegawaian yang kompeten serta mengoptimalkan keikutsartaan pegawai dalam diklat
		5. Tingkat pemahaman pegawai terhadap peraturan disiplin PNS masih dibawah standar yang diharapkan.	5. Monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkala kepada para SKPD dan UKPD secara simultan.
4	Bagian Perekonomian	1. Belum optimalnya pelayanan terhadap UKM, kewirausahaan baru, Pelayanan Ketenagakerjaan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok	1. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pembentukan kewirausahaan baru pada Kota Adm Jakpus; 2. Mengoptimalkan koordinasi dan monitoring harga kebutuhan pokok; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan monitoring pengembangan UKM; 4. Mengoptimalkan koordinasi dan monitoring penempatan tenaga kerja;
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan kota.
6	Bagian Umum dan Protokol	1. Belum optimalnya penyelenggaraan acara/kegiatan di lingkungan kantor 2. Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Belum optimalnya penatausahaan arsip dinamis	1. Sarana dan prasarana yang memadai 2. Mengoptimalkan pengelolaan BMD sesuai aturan. 3. Pemanfaatan sumber daya, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
7	Bagian Keuangan	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan;

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya layanan dasar terkait kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. 2. Pada layanan kesehatan masih diperlukan optimalisasi layanan posyandu serta kegiatan pendukung yang menjadi indikator seperti Pelaksanaan Kota sehat, kota layak anak, dan ditunjang dengan kegiatan pemberdayaan perempuan 3. Berkaitan dengan layanan pendidikan, masih diperlukan optimalisasi pemanfaatan dana BOP dan BOS serta pendidikan informal dalam lingkup peningkatan nilai-nilai keagamaan di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat 4. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya Basis data terpadu dari Penerima Manfaat yang terintegrasi menjadi permasalahan tersendiri dalam hal pendistribusian bantuan sosial secara tepat sasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi terhadap unit layanan kesehatan masyarakat 2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Kota Sehat, Kota Layak Anak, penguatan pemberdayaan perempuan serta monitoring PSN 3. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan BOS dan BOP 4. Penguatan basis data terpadu penerima manfaat dengan optimalisasi fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan 5. Meningkatkan sinergitas dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan serta optimalisasi peran dan pembinaan pada kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kota; 6. Mengoptimalkan kegiatan olahraga rakyat.
9	Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban, 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 3. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 4. Mengoptimalkan 5. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban; Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kabupaten
10	Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK; 3. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 4. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD) dan peningkatan kinerja PPSU	partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 5. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : FGD Tim Penyusun Renstra (diolah)

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

III.2.1. Visi

Dengan memperhatikan kondisi objektif, potensi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta serta amanat peraturan dan perundangan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka rumusan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah:

“Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
2. Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tentram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.

3. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
4. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
5. Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
6. Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan: i) tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ii) kepemimpinan daerah (leadership) yang dapat menjadi panutan, visioner, kreatif dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan iii) kerjasama, koordinasi dan kebersamaan diantara pemangku kepentingan

III.2.2. Misi

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Misi Satu : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan

sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada: prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

Misi Dua : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada: struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Misi Tiga : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada: perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Misi Empat : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang. Dalam upaya

melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada: pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Misi Lima : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

Misi Enam : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta. Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada: i) pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat, ii) pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi, iii) penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi, iv) penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif, v) penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi, dan vi) penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

Kota Administrasi mengemban misi nomor 5 (lima) yakni “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga

pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional”.

Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam Tabel 22 di bawah ini.

Tabel 22 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025

No.	Misi RPJPD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Kota Administrasi	Hambatan Kota Administrasi Dalam Mewujudkan Misi RPJPD	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD
1.	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.	1. Perlu mengoptimalkan aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas;	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 2. Mengoptimalkan pola karir pegawai serta meningkatkan kualitas pegawai fungsional maupun struktural

Sumber : FGD Tim Penyusun Renstra (diolah)

III.2.1. Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Periode 2023-2025 adalah periode kelima RPJPD Provinsi DKI Jakarta dimana tema utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada periode ini adalah mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global. Fokus dan target pembangunan pada tahap ini adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat. Salah satu Pembangunan periode ini diarahkan pada perwujudan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta yang maju, modern, handal, dan berdaya saing global yaitu **Penataan Kawasan Petojo Enclek**.

A. Area Perencanaan, Permasalahan dan Potensi

Secara administratif area perencanaan masuk ke dalam Wilayah Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan fokus perencanaan pada area Kawasan Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Pasar Petojo Enclek. Batas administrasi wilayah perencanaan, adalah:

- Sebelah Utara : Jl Suryopranoto dan Jl. Tanah Abang I
- Sebelah Timur : Jl. Abdul Muis
- Sebelah Selatan : Jl Petojo Enclek 14
- Sebelah Barat : Jl. Petojo Melintang

Permasalahan yang berada di area rencana penataan adalah penurunan kualitas visual dan fisik sarana dan prasarana eksisting, tidak terhubung dengan baik antar sarana transportasi publik dan jalur pejalan kaki, serta adanya pedagang informal yang menyebabkan rendahnya layanan jaringan jalan, Potensi yang dimiliki kawasan ini adalah lokasi yang berada di lingkungan strategis dengan fungsi lahan yang beragam seperti perkantoran, perdagangan dan jasa serta pusat kegiatan pemerintahan, serta lokasi yang berdekatan dengan Kawasan Harmoni - Juanda yang memiliki ketersediaan hub transportasi publik seperti Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL) dan akan tersedianya jalur MRT Jakarta

B. Konsep Pengembangan Kawasan

Konsep pengembangan Kawasan Petojo Enclek memiliki visi dan misi menjadi kawasan pemerintahan yang ramah pejalan kaki dengan berbasis sejarah dan pariwisata urban, dengan fokus meningkatkan walkability dan fasilitas pariwisata perkotaan, Tema yang diusung adalah Petodjo Leisure Walk Tour Trail. Beberapa fokus kegiatan rencana pengembangan kawasan, adalah:

1. Re-branding kawasan sehingga memberikan nilai tambah baik dari segi pariwisata, ekonomi, tata kota dan tata hijau.
2. Pembagian blok pemanfaatan lahan menjadi 4 blok dengan konsep, sebagai berikut:

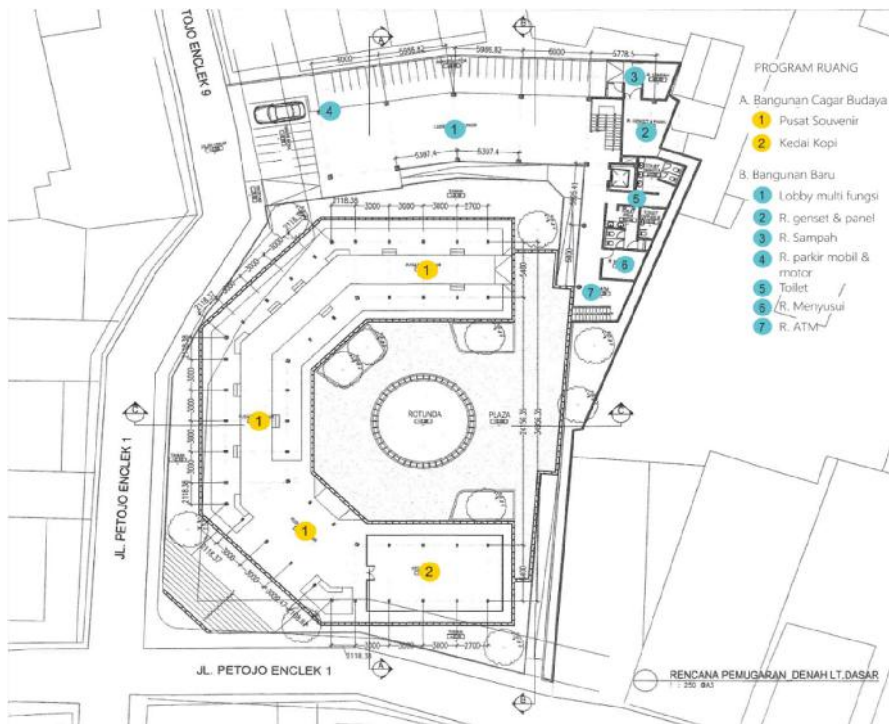
Blok	Area	Konsep Pengembangan
A	Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> a. Redesign Komplek Kantor Walikota sebagai pusat kegiatan primer dengan konsep green building. b. Penataan fasad bangunan di kantor Walikota Jakarta Pusat terutama bangunan lama agar memiliki kesatuan satu sama lain. c. Menciptakan ruang terbuka publik aktif di Kantor Walikota Jakarta Pusat.
B	Kawasan Museum Prasasti dan Jl. Tanah Abang I	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan wisata dengan beberapa daya tarik dan diintegrasikan dengan jalur wisata. b. Penataan bangunan dan lansekap terutama di sekeliling Jl. Tanah Abang 1 sebagai vocal point kawasan. c. Penataan kuliner terpusat berupa foodcourt. d. Penataan lanskap di area utama masuk dan penataan jalur hijau di jalur pedestrian. Dalam jangka panjang, lahan kosong berpotensi untuk dijadikan RTH lingkungan melalui kerjasama dengan pihak swasta.
C	Kawasan Pasar Petojo Enclek	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta peruntukkan campuran. b. Revitalisasi Pasar Petojo Enclek. c. Mempertahankan karakter bangunan modern di area perkantoran. d. Penataan jalur hijau di jalur pedestrian. Dalam jangka panjang, terdapat lahan

Blok	Area	Konsep Pengembangan
		berupa lahan ExSPBU berpotensi untuk dijadikan RTH lingkungan melalui kerjasama dengan pihak swasta
D	Koridor Jl. Kesehatan, Jl. Petojo Enclek	a. Pengembangan kawasan hunian beserta dengan sarana prasarana permukiman. b. Pengembangan Taman Vertikal (vertical garden) disepanjang pekarangan pemukiman warga dan penataan jalur hijau di jalur pedestrian.

3. Pengembangan Pasar Petojo Enclek.

PD. Pasar Jaya berencana untuk menjadikan Pasar Petojo Enclek menjadi Pasar tematik, yaitu bertema Handicraft. Untuk mengembangkan ekonomi sebagai penggerak sektor wisata yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang membentuk ruang-ruang kreatif bagi para pengrajin untuk dapat menghasilkan produk khas daerah wisata. Pasar Petojo Enclek terdiri dari dua bangunan, yaitu bangunan utama yang merupakan cagar budaya, dan bangunan-bangunan penunjang sebagai tambahan kiosk yang tersebar di sekeliling bangunan utama.

Gambar 9 Rencana Siteplan Pasar Petojo Enclek



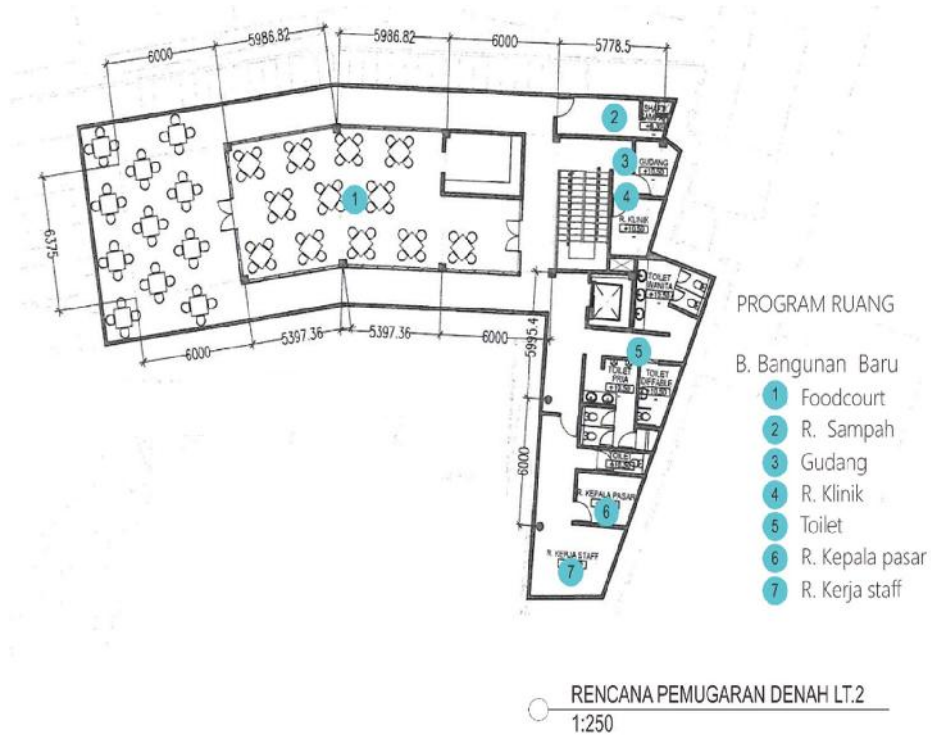
Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gambar 10 Rencana Lantai 1 Pasar Petojo Enclek



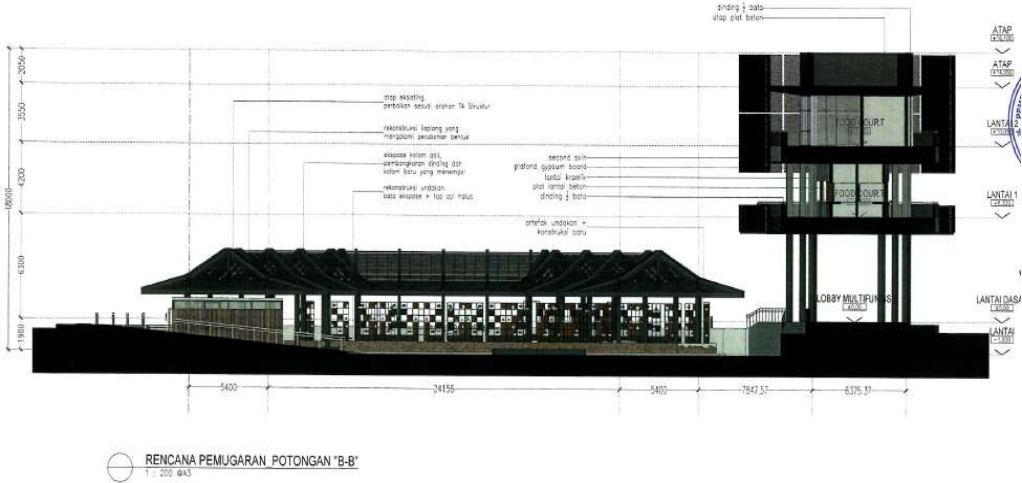
Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gambar 11 Rencana Lantai 2 Pasar Petojo Encek



Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gambar 12 Potongan Rencana Pasar Petojo Encek



Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gambar 13 Visualisasi Rencana Pasar Petojo Encek



Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

4. Pengembangan Jalan Walking Tour.

A. Koridor Jalan Intervensi

Berikut adalah jalan intervensi yang akan menjadi rencana jalur wisata pejalan kaki. Jalur wisata berbasis walkability ini memiliki 3 rute dengan panjang koridor

yang berbeda-beda. Koridor intervensi diantaranya adalah sebagai berikut: Jalan Tanah Abang 1, Jalan Suryopranoto, Jalan Petojo Enclek IX, Jalan Petojo Enclek I, jalan Petojo Enclek XIII, Jalan Petojo Enclek XIV, serta jalan Kebon Jahe Kober.

Gambar 14 Jalur intervensi untuk wisata pejalan kaki



Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

B. Rute Wisata Dan Destinasi Wisata Urban

Kawasan Petojo Enclek memiliki beberapa daya tarik wisata yang dapat dikembangkan. Lokasi yang terletak di tengah pusat kota membuat Petojo Enclek menjadi tempat yang sangat potensial untuk pengembangan wisata urban atau urban tourism. Wisata kota pada umumnya merupakan kegiatan wisata yang dilakukan dalam lingkup suatu kota dan melakukan berbagai kegiatan, seperti: berbelanja, menonton pertunjukan, mengunjungi festival, mengunjungi taman kota, dan masih banyak lagi. Ciri khas dari wisata urban adalah memiliki banyak destinasi dan dapat dikunjungi secara gratis seperti mengunjungi taman publik. Selain itu, wisata urban memiliki kelebihan dengan akses jalan yang mudah dan transportasi yang lengkap. Hal ini juga harus didukung dengan aksesibilitas yang cukup baik untuk memudahkan para wisatawan dalam mengunjungi berbagai atraksi wisata

yang ada. Konsep Walking Tour Trail secara tidak langsung mendukung pengembangan tersebut dengan mengarahkan pengunjung menuju daya tarik wisata.

Gambar 15 Titik destinasi wisata serta rute jalur wisata



Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

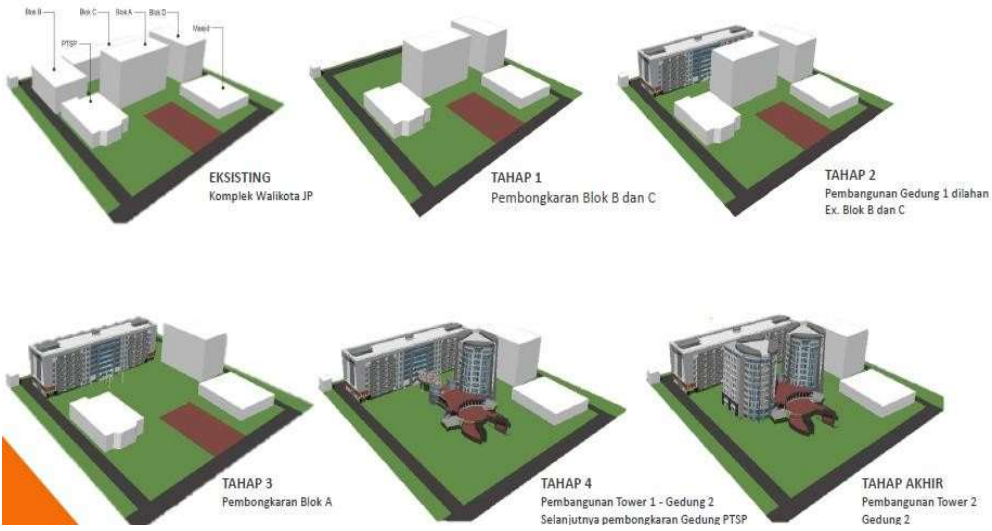
5. Pengembangan Perkantoran Walikota sebagai Ruang Publik.

Gambar 16 Masterplan Kantor Walikota Jakarta Pusat



Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

KONSEP PERKANTORAN WALIKOTA Zoning dan skenario pengembangan



KONSEP PERKANTORAN WALIKOTA Ruang outdoor



Desain plaza, dengan fasilitas area berkumpul (amphitheater/open space) mengarahkan pengguna ruang untuk duduk bersama dalam satu space, tanpa dipisahkan oleh hirarki dalam posisi duduk, sehingga membangun suasana yang lebih intim dan kekeluargaan

Selain sebagai tempat untuk berdiskusi dan berkumpul dengan masyarakat, plaza juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan utama yang diadakan Kantor Walikota Jakarta Pusat. Contohnya kegiatan festival kuliner, festival seni dan kebudayaan, dll.



Pada lantai dasar bangunan tower 1 dan 2 sepenuhnya akan digunakan untuk publik diantaranya akan ada ruang aspiration yang dimana akan direncanakan untuk masyarakat yang berkunjung dapat menuliskan pesan berisi aspirasi kepada Walikota, selanjutnya terdapat gallery urban



Co-working space pegawai



Co-working space publik



Spot corner

KONSEP PERKANTORAN WALIKOTA Tata hijau

	<p>Office Urban farming Merupakan sebidang lahan hijau yang diperuntukan untuk berkebun salah satunya menumbuhkan kebiasaan dalam ketahanan pangan di masa depan dan sustainability.</p>		<p>Water features Berfungsi sebagai water catchment area water feature seperti kolam juga berfungsi untuk menurunkan suhu lingkungan binaan.</p>
<p>Vertical garden Merupakan penghijauan pada dinding bangunan.</p>			
	<p>Outdoor workspace/Plaza Guna beradaptasi dengan keadaan pandemi, maka dibutuhkan banyak ruang bekerja outdoor yang dapat meningkatkan produktifitas serta mewadahi pekerjaan yang bersifat mobile. Dilengkapi oleh hotspot, para pekerja dapat bekerja, meeting dll sambil refreshing agar tidak jenuh.</p>	<p>Garden forest Merupakan sebidang lahan hijau yang diperuntukan untuk satwa liar seperti burung, tupai, kupu-kupu dimana hal tersebut merupakan upaya memenuhi asd poin 7. Taman ini dipenuhi oleh tanaman mengundang serangga seperti burung dan kupu-kupu, tanaman tersebut diantaranya adalah tanaman berbunga dan berbuah.</p>	

Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

C. Matriks Rencana Kegiatan

No	SKPD	Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Tahun Pelaksanaan (2023-2025)	Anggaran Indikatif (dalam Rupiah)
1	Sudin Bina Marga	Pelebaran jalur pejalan kaki dan aksesibilitas berkebutuhan khusus	Jl. Petojo Enclek XIV	1 paket	2024	25.694.540.800
			Jl. Petojo Enclek IX	4 paket		
			Jl. Petojo Enclek XIII			
			Jl. Petojo Enclek I			
			Jl. Petojo Enclek XIV Segmen 2			
			Jl. Petojo Melintang			
		Pengadaan street furniture atau bangunan pelengkap jalan (tempat sampah, PJU tematik, bangku taman dan area cuci tangan)	Jl. Kebon Jahe Kober V	2 paket	2024	732.152.498
			Jl. Petojo Enclek XIV			
			Jl. Tanah Abang I segmen 1	1 paket		
			Jl. Suryopranoto	3 paket		
			Jl. Petojo Enclek IX			
			Jl. Tanah Abang I segmen 2			

No	SKPD	Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Tahun Pelaksanaan (2023-2025)	Anggaran Indikatif (dalam Rupiah)
		Pembuatan Lay Bay untuk Loading Dock	Jl. Suryopranoto	1 titik	2024	57.600.000
		Redesign signage papan nama jalan sesuai tema kawasan	Jl. Kebon Jahe Kober V	2 titik	2024	97.200.000
			Jl. Petojo Enclek XIV			
			Jl. Tanah Abang I segmen 1	1 titik		
			Jl. Suryopranoto	3 titik		
			Jl. Petojo Enclek IX			
			Jl. Tanah Abang I segmen 2			
			Jl. Petojo Enclek XIII	9 titik		
			Jl. Petojo Enclek I			
			Jl. Petojo Enclek II			
			Jl. Petojo Enclek III			
			Jl. Petojo Enclek IV			
			Jl. Petojo Enclek IX			
			Jl. Petojo Enclek X			
			Jl. Petojo Enclek XI			

No	SKPD	Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Tahun Pelaksanaan (2023-2025)	Anggaran Indikatif (dalam Rupiah)
			Jl. Petojo Enclek XIII			
			Persimpangan Jl Kebon Jahe Kober V dan Jl Petojo Enclek IX	1 titik	2024	45.360.000
		Pengadaan/Pembuatan Way Finding	Jl Tanah Abang I segmen 1	3 titik	2024	-
			Persimpangan Jl Suryopranoto dan Jl Petojo Enclek IX			
			Jl Tanah Abang I segmen 2	2 titik		
			Persimpangan Jl Petojo Enclek XIII dan Jl Petojo Enclek I			
			Persimpangan Jl Petojo Enclek XIII dan Jl Petojo Enclek XIV			
2	Sudin Pertamanan dan Hutan Kota	Penataan Jalur Hijau Jl. Tanah Abang I (dari Pulau Jalan Tanah Abang I sd Lampu Merah Jl. Abdul Muis)	Jl. Tanah Abang I	247 m2	2024	80.000.000

No	SKPD	Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Tahun Pelaksanaan (2023-2025)	Anggaran Indikatif (dalam Rupiah)
		Penataan Jalur Hijau Jl. Petojo Enclek XIII	Jl. Petojo Enclek XIII	24 m2	2024	70.000.000
		Revitalisasi Jalur Hijau Median Jl. Tanah Abang I	Jl. Tanah Abang I	844 m2	2024	500.000.000
3	Sudin Lingkungan Hidup	Beautifikasi TPS Pasar Petojo Enclek dengan penambahan vertical garden	Jl Petojo Enclek IX	1 paket	2024	-
4	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pengadaan sistem signage informasi evakuasi bencana	Museum Taman Prasasti	3 titik	2024	-
			Kantor Kecamatan Gambir	1 titik		
			Kantor Kelurahan Petojo	3 titik		
5	Sudin Sumber Daya Air	Revitalisasi Saluran Ditch U Tertutup	Jl. Petojo Enclek XIV Segmen 1	±193,15 m	2024	5.687.214.607
			Jl. Petojo Enclek I	±85,08 m		
			Jl.Petojo Enclek II	±194,10 m		
			Jl. Petojo Enclek III	±130,52 m		
			Jl. Petojo Enclek IV	±150,58 m		
			▪ Jl. Petojo Enclek IX segmen 2	±138,45 m		

No	SKPD	Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Tahun Pelaksanaan (2023-2025)	Anggaran Indikatif (dalam Rupiah)
			▪ Jl. Petojo Enclek X	±198,66 m		
			▪ Jl. Petojo Enclek XIII	±198,66 m		
			▪ Jl. Petojo Enclek XIV segmen 2	±69,30 m		
			▪ Jl. Petojo Melintang	±279,78 m		
		Pengadaan sistem pemanenan air hujan (Rain Water Harvesting)	Multicenter Petojo Enclek	1 paket	2024	700.000.000
			Sekretariat RW 07	1 paket		
			Kantor Kecamatan Gambir	1 titik		
6	Bag. Umum dan Protokol Setko	Pembangunan Kantor Walikota Jakarta Pusat	Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 paket	2024	192.000.000.000
		Pengadaan sistem signage informasi evakuasi bencana		2 paket		
7	PD. Pasar Jaya	Revitalisasi Pasar Petojo Enclek	Jl Petojo Enclek IX	1 paket	2024	-
		Pembangunan Gate Pasar Petojo Enclek		1 titik		
8	Dinas Perhubungan	Pengadaan zebra cross	Jl. Tanah Abang I segmen 1	1 titik	2024	-
			Jl. Tanah Abang I segmen 2	6 titik		

No	SKPD	Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Tahun Pelaksanaan (2023-2025)	Anggaran Indikatif (dalam Rupiah)
			Jl. Petojo Enclek IX			
		Pengecatan Marka Jalan	Jl. Tanah Abang I segmen 1	1 paket		
			Jl. Petojo Enclek IX			
			Jl. Petojo Enclek IX			
			Jl. Petojo Enclek XIII			
			Jl. Petojo Enclek I			
			Pengadaan Pelican Bersinyal	Jl. Suryopranoto	1 titik	
		Pengadaan/pembuatan jalur sepeda dan marka drop off	Jl Kebon Jahe Kober V	2 paket		
			Jl Petojo Enclek XIV			
			Jl Tanah Abang I segmen 1	1 paket		
			Jl. Suryopranoto	2 paket		
			Jl Petojo Enclek XIII	2 paket		
		Pengadaan/pembuatan shelter sepeda	Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 titik		
			TPB Kantor Walikota			

No	SKPD	Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Tahun Pelaksanaan (2023-2025)	Anggaran Indikatif (dalam Rupiah)
			Jakarta Pusat 1			
			Jl Suryopranoto			
			Kantor Kelurahan Petojo Selatan			
9	▪ Dinas Bina Marga	Perencanaan dan Pembangunan	Jl. Tanah Abang I segmen 1	±336,13 m	2024	-
	▪ Perumda Sarana Jaya	Jaringan Listrik Kabel dan Serat Optik Telekomunikasi Bawah Tanah	Jl. Suryopranoto	±86,92 m		
			Jl. Tanah Abang I segmen 2	±330,48 m		
10	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Redesign Multicenter Petojo Enclek (Fasilitas Sosial)	Jl Petojo Enclek XIII	1 paket	2024	Menggunakan Dana Non-APBD
11	Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan booth kuliner di Taman Kuliner	Taman Kuliner (Jl. Tanah	1 paket		Menggunakan Dana Non-APBD
12	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan ruang interaksi berupa spot foto (mural)	Jl Petojo Enclek XIII	1 paket	2024	Menggunakan Dana Non-APBD

III.3. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Administrasi Jakarta Pusat.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Renstra berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2030 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan factor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah di tinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada RPD, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dapat diperoleh informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 pada tabel di bawah ini.

Tabel 23 Penentuan Isu Strategis

No	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	No	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	MOTTO	
1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1	Peningkatan kolaborasi pemerintah-swasta-warga	PEMERATAAN PEMBANGUNAN	MAJU	MASIF
		2	Forum kolaborasi tanggap bencana			
		3	Industri Mikro Kreatif			
		4	Optimalisasi Peran Walikota			
		5	Optimisasi Basis Data Terpadu Penerima Manfaat yang terintegrasi			
2	Sasaran RPD	1	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH YANG OPTIMAL	INKLUSIF	MASIF
3	Sasaran Renstra	1	Peningkatan Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal			
4	Implikasi RT/RW bagi pelayanan	1	Kesulitan Pengadaan Lahan			
		2	Kawasan yang belum tertata			

Sumber: Tim Penyusun Renstra (diolah)

Dari tabel 23 di atas dapat dijabarkan secara singkat yang menjadi isu strategis sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal;

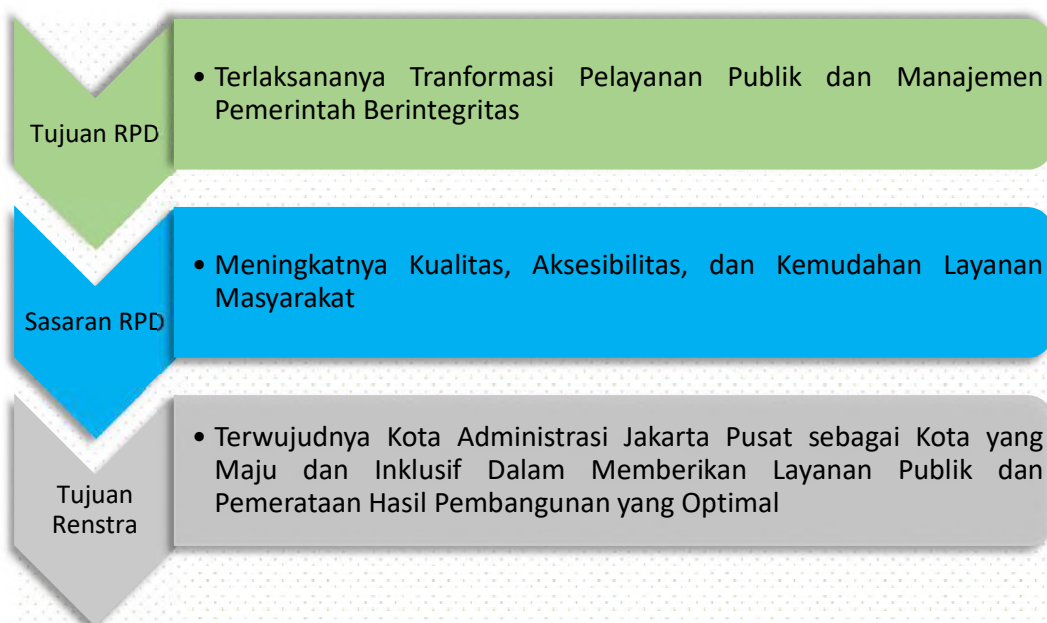
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi

Untuk menangani isu strategis Kota Administrasi dan menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kota Administrasi perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal”

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 24 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	87,3	87,85	89,5
		Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	88,5	88,6	88,7	88,8
			Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	85	86	87	88,5

Sumber: Cascading Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) : a) Perkembangan Teknologi Informasi; b) Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi; c) Partisipasi Masyarakat; d) Tumbuhnya Wirausaha Baru.	Tantangan (T): a. Percepatan Transformasi Digital di Segala Aspek pada Masa Pandemi; b. Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum; c. Pemenuhan Layanan Dasar; d. Penanganan Banjir; e. Penataan Kawasan; f. Perkembangan Perekonomian.
Kekuatan (S): a. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa; b. Adanya Komitmen Pimpinan; c. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan; d. Memiliki informasi terpadu pelayanan	Alternatif Strategi (S-O): a. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik; b. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya; c. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru; d. Melakukan pembinaan, pengawasan pembentukan wirausaha baru dan melakukan evaluasi demi tercapainya	Alternatif Strategi (S-T): a. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik; b. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan; c. Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKDM

	Peluang (O) : a) Perkembangan Teknologi Informasi; b) Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi; c) Partisipasi Masyarakat; d) Tumbuhnya Wirausaha Baru.	Tantangan (T): a. Percepatan Transformasi Digital di Segala Aspek pada Masa Pandemi; b. Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum; c. Pemenuhan Layanan Dasar; d. Penanganan Banjir; e. Penataan Kawasan; f. Perkembangan Perekonomian.
	peningkatan jumlah wirausaha baru; e. Meningkatkan kualitas pelayanan peran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; f. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam	
Kelemahan (W): a. Keterbatasan Kewenangan Wilayah; b. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima;	Alternatif Strategi (W-O): a. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat; b. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lambaga sosial kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi ; b. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, sera keamanan dan ketertiban kota

Sumber: Tim Penyusun Renstra (diolah)

V.2. Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

V.3. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan peran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan peran dan keprotokolan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kota Administrasi dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN RPD : Terlaksananya Tranformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
SASARAN RPD : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
RENSTRA KOTA ADMINISTRASI 2023-2026			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi	Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan peran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan peran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan peran dan keprotokolan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat
		Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan	Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai perangkat daerah unit pembantu Gubernur. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari :

7.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN**7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi

7.01.02.6.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan

7.01.02.6.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan

7.01.02.6.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan

7.01.02.6.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan

7.01.02.6.02.06 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan

7.01.02.6.02.07 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan

7.01.02.6.02.08 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan

7.01.02.6.02.09 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan

7.01.02.6.04 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

7.01.02.6.04.01 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan

7.01.02.6.04.02 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan

7.01.02.6.04.03 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan

7.01.02.6.04.04 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan

7.01.03 *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*

7.01.03.2.02 *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

7.01.03.2.03 *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

7.01.04 *PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*

7.01.04.2.01 *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.02.01 *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI*

7.02.01.1.02 *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

7.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

7.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

7.02.01.1.03 *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

7.02.01.1.03.01 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

7.02.01.1.05 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

7.02.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

7.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

7.02.01.1.08 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

7.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

7.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

7.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

7.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

7.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

7.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel

7.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel

7.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI

7.02.02.6.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi

7.02.02.6.03.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi

7.02.02.6.03.02 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi

7.02.02.6.03.03 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi

7.02.02.6.03.04 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi

7.02.02.6.03.05 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi

7.02.02.6.03.06 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi

7.02.02.6.03.07 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi

7.02.02.6.03.08 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi

7.02.02.6.03.09 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi

7.02.02.6.03.10 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi

7.02.02.6.03.11 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi

7.02.02.6.03.12 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi

7.02.02.6.03.13 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi

7.02.02.6.03.14 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi

7.02.02.6.03.15 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

7.02.02.6.03.16 Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi

- 7.02.02.6.03.17 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.18 Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.20 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.22 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan
- 7.02.02.6.03.24 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.25 Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.26 Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.27 Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.28 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.32 Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- 7.02.02.6.03.36 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.37 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.38 Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.39 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.40 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi

- 7.02.02.6.03.42 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.44 Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi
- 7.02.02.6.03.45 Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi

7.02.02.6.03.46 Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi

Secara terperinci, uraian program, kegiatan, indikator beserta pagu indikatif disajikan dalam Tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4,1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KOTA YANG MAJU DAN INKLUSIF DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	421.990.096.158	87,3	452.748.413.335	87,85	473.114.037.075	89,5	507.087.382.997	89,5	1.854.939.929.565		
1,1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	0	88,5	421.990.096.158	88,6	452.748.413.335	88,7	473.114.037.075	88,8	507.087.382.997	88,8	1.854.939.929.565		
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	370.541.402.172	4	400.642.283.803	4	420.348.100.139	4	453.659.148.341	4	1.645.190.934.455	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		4		4		4		Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	1.108.667.522	4	1.215.209.164	4	1.321.962.806	4	1.426.947.538	4	5.072.787.030	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1.108.667.522	1	1.215.209.164	1	1.321.962.806	1	1.426.947.538	4	5.072.787.030	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	200.612.055.046	4	204.612.055.046	4	208.612.055.046	4	212.612.055.046	4	826.448.220.184	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	200.612.055.046	12	204.612.055.046	12	208.612.055.046	12	212.612.055.046	48	826.448.220.184	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	166.829.535.457	4	191.949.535.457	4	208.269.535.457	4	238.989.535.457	4	806.038.141.828	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	389	389	2.694.965.095	389	2.694.965.095	389	2.694.965.095	389	2.694.965.095	1556	10.779.860.380	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	6.811.683.000	12	7.311.683.000	12	7.811.683.000	12	8.311.683.000	48	30.246.732.000	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	5327	5327	153.833.331.345	5327	173.833.331.345	5327	193.833.331.345	5327	223.833.331.345	5327	745.333.325.380	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	1.343.779.410	4	1.343.779.410	4	1.343.779.410	4	1.343.779.410	16	5.375.117.640	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1.236.079.385	1	1.436.079.385	1	1.636.079.385	1	1.836.079.385	4	6.144.317.540	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	454.848.611	1	464.848.611	1	474.848.611	1	484.848.611	4	1.879.394.444	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Jakarta Pusat	
7.01.02.6.02.08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	0	0	0	1	4.400.000.000	0	0	0	0	1	4.400.000.000	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	454.848.611	1	464.848.611	1	474.848.611	1	484.848.611	4	1.879.394.444	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	4	4	1.991.144.147	4	2.865.484.136	4	2.144.546.830	4	630.610.300	4	7.631.785.413	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.606.555.000	12	1.659.294.000	12	1.715.568.500	12	177.565.500	48	5.158.983.000	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	216.753.750	4	226.510.937	4	236.707.934	4	247.372.925	16	927.345.546	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	167.835.397	1	179.679.199	1	192.270.396	1	205.671.875	4	745.456.867	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	800.000.000	0	0	0	0	1	800.000.000	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	48.638.193.986	4	49.185.167.132	4	49.733.988.936	4	50.284.751.831	4	197.842.101.885	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	46.106.011.048	4	46.606.011.048	4	47.106.011.048	4	47.606.011.048	4	187.424.044.192	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Jakarta Pusat	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4551	4551	46.106.011.048	4551	46.606.011.048	4551	47.106.011.048	4551	47.606.011.048	18204	187.424.044.192	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	4	4	2.532.182.938	4	2.579.156.084	4	2.627.977.888	4	2.678.740.783	4	10.418.057.693	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	823	823	1.332.182.938	823	1.379.156.084	823	1.427.977.888	823	1.478.740.783	823	5.618.057.693	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0	387	1.200.000.000	387	1.200.000.000	387	1.200.000.000	387	1.200.000.000	387	4.800.000.000	Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	2.810.500.000	4	2.920.962.400	4	3.031.948.000	4	3.143.482.825	4	11.906.893.225	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100	2.810.500.000	100	2.920.962.400	100	3.031.948.000	100	3.143.482.825	100	11.906.893.225	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	2.810.500.000	4	2.920.962.400	4	3.031.948.000	4	3.143.482.825	16	11.906.893.225	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KOTA YANG MAJU DAN INKLUSIF DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	341.635.955.560	87,3	441.881.491.244	87,85	434.883.227.324	89,5	509.790.797.902	89,5	1.728.191.472.030		
		PEMBINAAN DAN EVALUASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI	Dokumen	1	1		1		1		1		4		Bagian Pemerintahan	
		PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KOTA ADMINISTRASI	Lembaga	3	3		3		3		3		12		Bagian Pemerintahan	
		PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA ADMINISTRASI	Laporan	1	1		1		1		1		4		Bagian Pemerintahan	
		PELAKSANAAN RAPIM DAN RAKORWIL KOTA ADMINISTRASI	Dokumen	4	4		4		4		4		16		Bagian Pemerintahan	
		PELAKSANAAN PARTISIPASI KOTA ADMINISTRASI DALAM ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA (APEKSI)	Dokumen	1	1		1		1		1		4		Bagian Pemerintahan	
		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN/ PEMBANGUNAN/ REHAB TOTAL/ REHAB SEDANG KANTOR LURAH KOTA ADMINISTRASI	Dokumen	1	1		1		1		1		4		Bagian Pemerintahan	
1,1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	85	341.635.955.560	86	441.881.491.244	87	434.883.227.324	88,5	509.790.797.902	88,5	1.728.191.472.030		

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	77	80	339.065.030.954	83	439.336.937.217	85	432.217.031.666	90	506.942.577.333	90	1.717.561.577.170	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4		4		4		4		4		Bagian Keuangan	
															Bagian Umum dan Protokol	
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	4	4	230.219.730.664	4	229.241.561.574	4	228.264.542.277	4	227.286.694.085	4	915.012.528.600	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	539	525	230.000.000.000	520	229.000.000.000	515	228.000.000.000	510	227.000.000.000	2070	914.000.000.000	Bagian Keuangan	DKI JAKARTA
7.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	53	53	219.730.664	53	241.561.574	53	264.542.277	53	286.694.085	212	1.012.528.600	Bagian Keuangan	DKI JAKARTA
7.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	800.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Bagian Pemerintahan	
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Jakarta Pusat	
7.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	0	4	1.450.000.000	4	1.720.000.000	4	2.025.000.000	4	2.375.000.000	4	7.570.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	12	500.000.000	12	750.000.000	12	1.000.000.000	12	1.250.000.000	48	3.500.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	9	950.000.000	1	970.000.000	9	1.025.000.000	1	1.125.000.000	20	4.070.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	4	4	11.586.457.455	4	12.707.077.910	4	13.815.757.250	4	14.976.370.148	4	53.085.662.763	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	53	296.674.444	53	326.341.888	53	358.976.077	53	394.873.685	212	1.376.866.094	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	322.501.415	3	354.751.557	3	390.226.712	3	429.249.383	12	1.496.729.067	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	3	1.383.618.919	3	1.493.109.476	3	1.609.456.799	3	1.732.694.949	12	6.218.880.143	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	495.513.304	3	545.064.634	3	599.571.098	3	659.528.208	12	2.299.677.244	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	818.619.901	3	1.045.890.168	3	1.175.142.866	3	1.307.124.511	12	4.346.777.446	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	370	370	4.497.147.589	370	4.848.448.695	370	5.252.729.451	370	5.684.722.744	1480	20.283.048.479	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	2.692.381.883	4	2.888.471.492	4	3.089.654.247	4	3.284.676.668	16	11.955.184.290	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	4	50.000.000	4	65.000.000	4	80.000.000	4	92.500.000	16	287.500.000	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	DKI JAKARTA
															Bagian Perekonomian	
															Bagian Kesejahteraan Rakyat	
7.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	4	180.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.331.000.000	4	4.641.000.000	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
																Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	28.080.567.123	4	122.444.587.772	4	113.607.927.956	4	181.384.471.925	4	445.517.554.776	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA	
															Bagian Umum dan Protokol		
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
7.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	159	1.785.022.102	159	1.825.000.000	159	6.593.753.488	159	4.253.128.836	636	14.456.904.426	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA	
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
7.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	100	1.485.022.102	100	1.633.524.313	100	3.593.753.488	100	3.953.128.836	400	10.665.428.739	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA	
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
7.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	75	4	19.680.000.000	5	111.242.488.248	9	100.242.488.248	9	169.742.488.248	27	400.907.464.744	Bagian Umum dan Protokol dan Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA	
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
																Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	3.000.000.000	10	5.400.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	40	9.600.000.000	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA	
7.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	24	2.130.522.919	24	2.343.575.211	24	2.577.932.732	24	2.835.726.005	96	9.887.756.867	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA	
																Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
																Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	33.025.036.373	4	35.363.438.668	4	37.906.300.254	4	40.919.441.408	4	147.214.216.703	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA	
																Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
																Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	491.186.906	12	513.746.250	12	536.933.563	12	560.780.241	48	2.102.646.960	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	
7.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	19.058.679.625	12	20.140.792.677	12	21.319.120.846	12	22.863.965.833	48	83.382.558.981	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA	
																Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
																Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	2.747.248.800	4	2.981.252.000	4	3.224.307.760	4	3.464.974.848	16	12.417.783.408	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	10.727.921.042	12	11.727.647.741	12	12.825.938.085	12	14.029.720.486	48	49.311.227.354	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	34.503.239.339	4	37.660.271.293	4	36.397.503.929	4	39.800.599.767	4	148.361.614.328	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Bagian Pemerintahan	
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	53	53	792.762.851	53	795.671.438	53	798.870.884	53	802.390.274	212	3.189.695.447	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	53	53	2.966.512.237	53	3.167.533.178	53	3.376.208.466	53	3.622.941.146	212	13.133.195.027	Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	53	53	20.178.857.067	53	22.251.767.640	53	19.804.036.054	53	21.888.971.596	212	84.123.632.357	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	4.888.365.179	12	5.377.201.697	12	5.914.921.867	12	6.506.414.053	48	22.686.902.796	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	53	53	220.628.890	53	231.660.330	53	243.243.350	53	255.405.520	212	950.938.090	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
															Kecamatan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Kelurahan dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.570.924.606	86	2.544.554.027	87	2.666.195.658	88,5	2.848.220.569	88,5	10.629.894.860	Bagian Hukum	DKI JAKARTA
															Bagian Pemerintahan	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		Bagian Perekonomian	
															Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	2.570.924.606	100	2.544.554.027	100	2.666.195.658	100	2.848.220.569	100	10.629.894.860	Bagian Hukum	DKI JAKARTA
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100		100		100		100		100		Bagian Hukum	
															Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	
															Bagian Perekonomian	
															Bagian Umum dan Protokol	
															Bagian Keuangan	
															Bagian Kesejahteraan Rakyat	
															Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
															Bagian Pemerintahan	
7.02.02.6.03.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	Lembaga	500	500	10.000.000	500	11.000.000	500	12.000.000	500	13.000.000	500	46.000.000	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	70.850.000	4	74.500.000	4	78.200.000	4	82.100.000	16	305.650.000	Bagian Hukum	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6.03.03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	34.600.000	4	36.500.000	4	38.500.000	4	40.100.000	16	149.700.000	Bagian Hukum	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	80.664.000	4	84.697.200	4	88.932.060	4	93.378.663	16	347.671.923	Bagian Hukum	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen	0	1	799	1	838,95	1	880,9	1	925	4	3.443.850	Bagian Hukum	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	4	4	3.090.852	4	3.090.852	4	3.090.852	4	3.090.852	16	12.363.408	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	1	1	4.940.000	1	4.940.000	1	4.940.000	1	4.940.000	4	19.760.000	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen	4	4	7.560.000	4	7.740.000	4	7.920.000	4	8.100.000	16	31.320.000	Bagian Perekonomian	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	0	4	433.533.573	4	314.429.668	4	345.872.635	4	476.886.930	16	1.570.722.806	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen	0	4	315.701.760	4	347.271.936	4	381.999.130	4	420.199.043	16	1.465.171.869	Bagian Umum dan Protokol	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	1.260.000	2	1.260.000	2	1.260.000	2	1.260.000	8	5.040.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	4.320.000	2	4.320.000	2	4.320.000	2	4.320.000	8	17.280.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	1.080.000	2	1.080.000	2	1.080.000	2	1.080.000	8	4.320.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1.080.000	1	1.080.000	1	1.080.000	1	1.080.000	4	4.320.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6.03.15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	1	1	52.029.500	1	52.029.500	1	52.029.500	1	52.029.500	4	208.118.000	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	1	1	3.500.000	1	3.750.000	1	4.000.000	1	4.250.000	4	15.500.000	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	4	4	45.000.000	4	46.000.000	4	47.000.000	4	48.000.000	16	186.000.000	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	4	106.000.000	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	16	20.000.000	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen	2	2	3.900.000	2	3.900.000	2	3.900.000	2	3.900.000	8	15.600.000	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4.572.428	4	4.572.428	4	4.572.428	4	4.572.428	16	18.289.712	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	9.081.672	1	22.191.672	1	22.191.672	1	9.081.672	4	62.546.688	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	2.840.000	1	2.840.000	1	2.840.000	1	2.840.000	4	11.360.000	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen	4	4	32.500.000	4	37.500.000	4	42.500.000	4	47.500.000	16	160.000.000	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan	0	1	400.000.000	1	425.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	4	1.725.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6.03.36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen	1	1	35.000.000	1	37.500.000	1	45.000.000	1	50.000.000	4	167.500.000	Bagian Keuangan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	16.204.660	4	16.204.660	4	17.459.320	4	17.459.320	16	67.327.960	Bagian Keuangan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	3.410.000	4	3.410.000	4	4.220.000	4	4.220.000	16	15.260.000	Bagian Keuangan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	12	12	805.457.161	12	805.457.161	12	805.457.161	12	805.457.161	48	3.221.828.644	Bagian Pemerintahan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	2	2	75.230.000	2	75.230.000	2	75.230.000	2	75.230.000	8	300.920.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	57.500.000	4	60.000.000	4	62.500.000	4	65.000.000	16	245.000.000	Bagian Keuangan	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	16	20.000.000	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	16	60.000.000	Bagian Perekonomian	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.46	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	5.220.000	4	5.220.000	4	5.220.000	4	5.220.000	16	20.880.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DKI JAKARTA

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Table 28 Indikator Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	0	Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5	89,5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	0	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8	88,8
3	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	0	Nilai	85	86	87	88,5	88,5
4	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	0	Nilai	85	86	87	88,5	88,5
5	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	Nilai	85	86	87	88,5	88,5
6	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	0	Nilai	85	86	87	88,5	88,5
7	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	77	Persen	80	83	85	90	90
8	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks	4	4	4	4	4
9	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	Indeks	4	4	4	4	4

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	Indeks	4	4	4	4	4
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4	Indeks	4	4	4	4	4
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	Indeks	4	4	4	4	4

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahun mendatang yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal perlu adanya kolaborasi pemangku kepentingan serta dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di wilayah Jakarta Pusat.

Diharapkan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 - 2026 ini dapat menjadi pedoman bagi Kelurahan, Kecamatan dan Bagian di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugasnya.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001